

SKRIPSI

**PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN MELALUI PROGRAM
WASTE COLLECTING POINT (WCP) DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN PEREMPUAN
(Studi Kasus di Gampong Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraksa,
Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

CUT BEUTARI RIDHAYA

NIM. 160404013

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR – RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2020 M / 1442 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-I dalam
Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam**

Diajukan oleh:

Cut Beutari Ridhaya

NIM. 160404013

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II



Dr. T. Lembong Misbah, MA

NIP. 197405222006041003



Dede Suhendra, MH

**PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN MELALUI PROGRAM
WASTE COLLECTING POINT (WCP) DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN PEREMPUAN
(Studi Kasus di Gampong Alue Deah Teungoh Kecamatan Meuraksa,
Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Program Studi
Pengembangan Masyarakat Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 28 Januari 2021 M
15 Jumadil Akhir 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

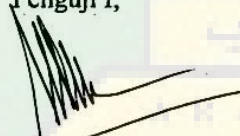
Ketua,


Dr. T. Lembong Misbah, MA
NIP. 197405222006041003

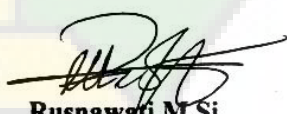
Sekretaris,


Dede Suhendra, M.H

Penguji I,


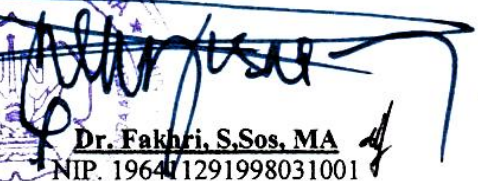

Drs. M. Jakfar Puteh, M.Pd
NIP. 195508181985031005

Penguji II,


Rusnawati, M.Si
NIP. 197703092009122003

Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh



Dr. Fakhri, S.Sos, MA
NIP. 19641291998031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cut Beutari Ridhaya

NIM : 160404013

Jenjang : Strata Satu (S1)

Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Banda Aceh, 25 Januari 2021
Yang Membuat Pernyataan,



Cut Beutari Ridhaya
Cut Beutari Ridhaya

AR-RANIRY

ABSTRAK

Nama : Cut Beutari Ridhaya
NIM : 160404013
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi Islam/ Pengembangan Masyarakat Islam
Judul : Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program *Waste Collecting Point* (WCP) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan di Gampong Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraksa, Kota Banda Aceh.
Tanggal Sidang : 28 Januari 2021 / 15 Jumadil Akhir 1442 H
Tebal Skripsi : 115 Halaman
Pembimbing I : Dr. T. Lembong Misbah, M.A
Pembimbing II : Dede Suhendra, M.H

Penelitian ini dilakukan berangkat dari adanya fenomena gerakan perempuan di Gampong Alue Deah Teungoh dalam mengolah sampah sebagai penunjang kesejahteraan keluarga. Perempuan kerap dianalogikan sebagai kelompok lemah yang kurang berdaya, padahal perempuan mempunyai kemampuan untuk berkembang sebagaimana kaum laki-laki. Dari masalah tersebut memunculkan rumusan masalah. Pertama, bagaimana bentuk pemberdayaan ekonomi melalui program *Waste Collecting Point* (WCP) di Gampong Alue Deah Teungoh. Kedua, bagaimana peningkatan kesejahteraan ekonomi perempuan melalui program *Waste Collecting Point* (WCP) dalam hal pemberdayaan perempuan di Gampong Alue Deah Teungoh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Grounded Reseach*) yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep pemberdayaan yang dikemukakan oleh Chambers dan lima dimensi yang harus dipenuhi dalam pemberdayaan ekonomi perempuan yang dikemukakan oleh Karl Marx. Hasil penelitian ini yaitu pertama, bentuk pemberdayaan ekonomi melalui program *Waste Collecting Point* (WCP) di Gampong Alue Deah Teungoh ialah daur ulang sampah menjadi produk layak guna dan bernilai jual, pembuatan pupuk kompos dan *field gardening*, dan kaderisasi *cleaning leader*. Kedua, peningkatan kesejahteraan ekonomi perempuan melalui program *Waste Collecting Point* (WCP) ialah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, memperluas jaringan wcp, dan meningkatkan penghasilan.

Kata Kunci : *Pemberdayaan Ekonomi, Perempuan, Waste Collecting Point, Peningkatan Kesejahteraan*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam atas junjungan umat, Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan karya ilmiah merupakan salah satu tugas mahasiswa dalam menyelesaikan studi di suatu lembaga pendidikan. Dalam memenuhi hal tersebut penulis telah memilih judul *“Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program Waste Collecting Point (WCP) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan (Studi Kasus di Gampong Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraksa, Kota Banda Aceh.”* Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. T. Lembong Misbah, S. Ag., M.A. sebagai pembimbing I dan Bapak Dede Suhendra, MH. sebagai pembimbing II yang pada saat-saat kesibukannya masih dapat menyempatkan diri untuk memberi bimbingan, pengarahan dan dukungan sehingga skripsi dapat terselesaikan.

Penghargaan yang tak terhingga kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Dr. Fakhri, S.Sos., M.A., Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Ibu Dr. Rasyidah, M.Ag. yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, serta seluruh stafnya, Penasehat Akademik Drs. Mahlil, M.A., serta seluruh staf pengajar dan pegawai di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah banyak memberikan bantuan yang berhubungan dengan skripsi ini.

Penghargaan tak terhingga serta salam terkasih untuk Ibunda Tercinta Rudiati, S.Pd., M.Pd. dan Ayahanda Ir. T. Azhari yang telah bersusah payah

membesarkan serta tidak pernah putus memberikan kasih sayang serta dukungannya, baik secara materi, moril maupun doa. Sungguh segala hal yang penulis lakukan tidak akan pernah wujud tanpa doa Ibunda dan Ayahanda Tercinta. Ucapan terima kasih tak lupa penulis sampaikan kepada adik kandung saya T. Fahrian Azhari yang ikut membantu dan memberi dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

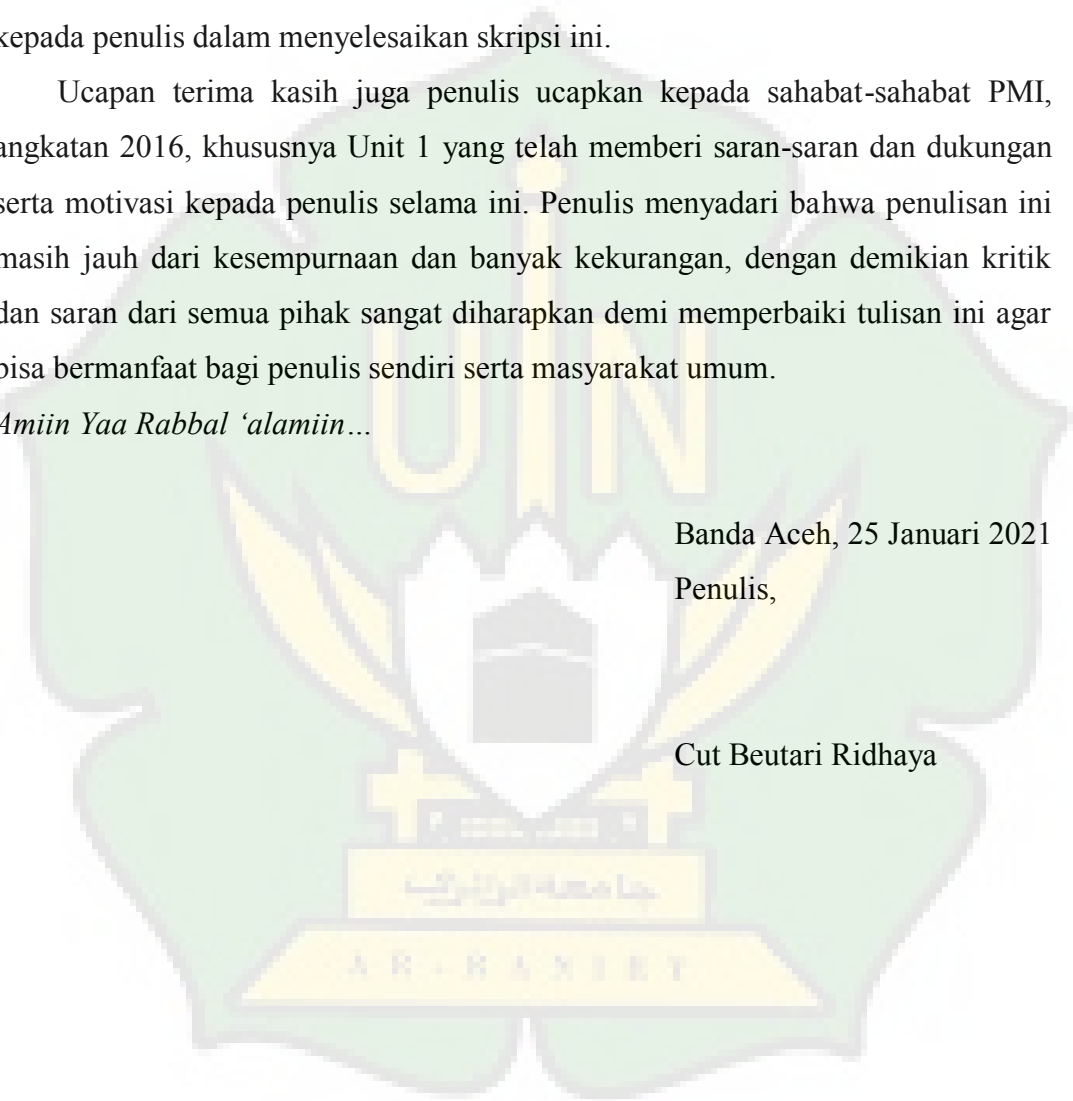
Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat PMI, angkatan 2016, khususnya Unit 1 yang telah memberi saran-saran dan dukungan serta motivasi kepada penulis selama ini. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, dengan demikian kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi memperbaiki tulisan ini agar bisa bermanfaat bagi penulis sendiri serta masyarakat umum.

Amiin Yaa Rabbal 'alamiin...

Banda Aceh, 25 Januari 2021

Penulis,

Cut Beutari Ridhaya



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka pengelolaan sampah yang berkelanjutan	36
Gambar 2 Alur Sampah Sistem <i>Waste Collecting Point</i> (WCP)	39
Gambar 3 Gampong Alue Deah Teungoh Tampilan Satelit	48
Gambar 4 Pemilahan Sampah Rumah Tangga Berdasarkan Jenisnya.....	64
Gambar 5 Sebelum Pengolahan Sampah	64
Gambar 6 Contoh Hasil Daur Ulang.....	64
Gambar 7 Wadah Semai Hasil Daur Ulang	65
Gambar 8 Tempat Penyimpanan Pupuk Kompos	66
Gambar 9 Tempat Peletakan Bibit Semai (<i>Seedling</i>).....	66
Gambar 10 Dokumentasi Kunjungan Ibu-Ibu Gampong Alue Deah Glumpang.....	80
Gambar 11 Dokumentasi Kunjungan Bapak Walikota H. Aminullah Usman.	80
Gambar 12 Dokumentasi Kunjungan Bapak Walikota Higashi Matsushima ..	81

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I	PENDAHULUAN 1
	A. Latar Belakang Masalah 1
	B. Rumusan Masalah 6
	C. Tujuan Penelitian 7
	D. Manfaat Penelitian 7
	E. Definisi Konsep 8
	F. Sistematika Pembahasan 10
BAB II	KAJIAN KEPUSTAKAAN 12
	A. Penelitian Terdahulu yang Relevan 12
	B. Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi 13
	1. Konsep Pemberdayaan 17
	2. Aspek – Aspek Penunjang Pemberdayaan Ekonomi ... 18
	C. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan 24
	D. Kesejahteraan Masyarakat 28
	1. Indikator Kesejahteraan 28
	2. Faktor Pendukung 31
	E. Program <i>Waste Collecting Point</i> 31
	1. Definisi 31
	2. Sistem Pengolahan Sampah 32
	3. WCP dalam Konsep Keberlanjutan 34
	4. Perkembangan dan Model WCP di Banda Aceh 37
BAB III	METODE PENELITIAN 41
	A. Pendekatan Penelitian 41
	B. Kehadiran Peneliti 41
	C. Sumber Data 42
	D. Teknik Pengumpulan data 42
	E. Teknik Analisis Data 43
	F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 45
	G. Tahapan Penelitian 46

BAB IV	PENYAJIAN DAN TEMUAN PENELITIAN	47
	A. Profil Umum Objek Penelitian	47
	1. Letak Geografis.....	47
	2. Sejarah Singkat Gampong dan Struktur Organisasi Gampong.....	48
	B. Profil <i>Waste Collecting Point</i> di Gampong Alue Deah Tengah.....	50
	1. Sejarah WCP	50
	2. Struktur WCP	55
	C. Bentuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui <i>Waste Collecting Point</i>	57
	1. Daur Ulang Sampah Menjadi Produk Layak Guna dan Bernilai Jual.....	60
	2. Pembuatan Pupuk Kompos dan Field Gardening	65
	3. Kaderisasi Cleaning Leader	69
	D. Bentuk Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Perempuan ..	71
	1. Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan.....	71
	2. Memperluas Jaringan WCP	72
	3. Meningkatkan Penghasilan.	73
BAB V	PENUTUP	74
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran.....	74
	DAFTAR PUSTAKA.....	75
	LAMPIRAN	
	GAMBAR	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informan yang Diwawancarai.....	44
Tabel 2. Pembayaran Daur Ulang Tahun 2019 Gampong Alue Deah Tengah	76



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Surat Keterangan Bimbingan Skripsi

Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 5 : Dokumentasi Pada Saat Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya pengembangan kualitas masyarakat yang tinggal dalam suatu daerah khususnya kota, tentu banyak hal yang akan menjadi aspek atau sisi yang akan diperhatikan dalam melakukan pengembangan hingga pemberdayaan tersebut. Seperti masalah kebersihan kota yang menjadi salah satu contohnya. Kebersihan kota merupakan salah satu aspek penting yang menjadi titik fokus dari pengelolaan suatu nilai atau kualitas kota. Hal ini disebabkan karena kebersihan adalah aspek yang mencakup atau terdapat dalam bagian dari beberapa aspek lain dalam menunjang atau meningkatkan kualitas kota itu sendiri. Seperti sistem ekonomi, kesehatan, daya tarik wisatawan dan masih banyak lagi.

Namun tidak jarang terkadang suatu kota terkendala dalam mengatur kebersihan tersebut. Banyak yang menjadi faktor, antara lain sistem pengelolaan yang kurang relevan, masyarakat yang kurang atau bahkan tidak sadar akan pentingnya kebersihan hingga oknum – oknum tertentu yang dengan sengaja memperburuk situasi tersebut dengan membuang sampah – sampah sembarangan tanpa tau akibat buruk yang berkepanjangan dari hal tersebut.¹

Terdapat juga hal lain yang menjadi penyebab memburuknya situasi tersebut, yaitu penambahan populasi atau jumlah penduduk. Dengan meningkatnya populasi suatu penduduk tentunya menyebabkan meningkatnya pula jumlah sampah harian yang tidak jarang mengganggu hingga merusak aspek – aspek penting lain yang bahkan menyebabkan bencana lainnya. Seperti banjir dikarenakan drainase yang tersumbat sampah yang dibuang sembarangan, munculnya biang penyakit menular dari tumpukan sampah – sampah rumah tangga yang dibiarkan terus bertumpuk hingga menurunnya

¹ Eifel Rio, dkk., Perencanaan Aplikasi Informasi Tempat Pembuangan Sampah Terdekat di Kota Jambi Berbasis Android, *Jurnal Ilmiah Media Processor*, Vol. 10, No. 2, Oktober 2015, hlm 556-557

daya tarik wisatawan terhadap kota tersebut yang pastinya menyebabkan turunnya pendapatan ekonomi daerah.

Di kota Banda Aceh sebagai ibu kota dari Provinsi Aceh sendiri juga mengalami hal serupa yaitu gagalnya mempertahankan Piala Adipura Periode 2017-2018 dikarenakan sampah yang berada di luar kendali.² Hal ini sulit untuk dihindari sebab setiap harinya warga kota Banda Aceh menghasilkan kurang lebih sebanyak 576 ton sampah. Yang mana jumlah tersebut berasal dari produksi sampah dari 64.000 rumah tangga. Jika ditotal maka sampah yang dihasilkan dari rumah tangga tersebut sebesar 210.000 ton per tahun. Bahkan hasil tersebut belum termasuk dari sampah yang dihasilkan dari pasar, rumah sakit, sekolah, dunia usaha hingga instansi pemerintahan.³

Hal tersebut tentunya akan berakibat sangat buruk bagi keberlangsungan dan keindahan hingga kesehatan dari Kota Banda Aceh. namun untuk itu Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengeluarkan salah satu aturan yang diharapkan akan menjadi solusi dalam menghadapi fenomena sampah kepada masyarakat kota Banda Aceh yaitu melalui Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dengan Sistem *Waste Collecting Point*.

Program *Waste Collecting Point* (yang selanjutnya disebut WCP) merupakan suatu usaha yang diterapkan pemerintah kota Banda Aceh dalam mengatasi atau mengendalikan timbunan sampah dengan pola pengurangan sampah pada sumber – sumber sampah tersebut.⁴

Salah satu desa atau gampong di kota Banda Aceh lebih tepatnya Gampong Alue Deah Teungoh menjadi titik fokus yang penulis rasa menarik karena pada gampong tersebut telah berjalan dan berkembang secara baik mengenai program pengendalian sampah melalui program WCP tersebut.

² <https://www.kumparan.com/amp/acehkini/sampah-banda-aceh-kisah-lepasnya-adipura-1550719255977833555/>, diakses pada 13 Agustus 2020, pukul 22:15 WIB.

³ <https://www.ajnn.net/news/banda-aceh-produksi-576-ton-sampah-tiap-hari/>, diakses pada 13 Agustus 2020, Pukul 22:19 WIB.

⁴ Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dengan Sistem *Waste Collecting Point*, poin Menimbang a., diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/70307/perwali-kota-banda-aceh-no-7-tahun-2017/>, diakses pada 13 Agustus 2020, Pukul 22:10 WIB

Berangkat dari adanya sistem pengelolaan sampah melalui sistem WCP ini tentu memunculkan bentuk pemberdayaan baru bagi masyarakat gampong Alue Deah Teungoh. Terlebih dalam teknis prakteknya ternyata pihak panitia atau pengelola program WCP tersebut tidak hanya menggunakan tenaga yang berasal dari laki – laki, namun juga melibatkan pihak atau kaum perempuan dalam hal pengelolaannya yang tentunya menjadi hal menarik untuk dikaji secara lebih dalam.

Berdasarkan data yang dikumpulkan pada observasi awal, yaitu hasil wawancara awal dengan *cleaning leader* dari Program WCP di Gampong tersebut menyebutkan bahwa awalnya masyarakat Gampong tersebut hanya menerapkan hukum adat yang biasa dipakai dalam masyarakat untuk hal pengendalian sampah yaitu menyapu dan mengumpulkannya pada satu tempat kemudian membakarnya. Namun setelah program WCP tersebut diperkenalkan oleh salah seorang staff dari Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh (DLHK3) yang bernama Ibu Yusrida yang saat itu baru pulang dari Jepang beliau melihat dan mulai memasuki Gampong Alue Deah Teungoh dan berniat menjadikan Gampong tersebut sebagai Gampong Percontohan (*Pilot Project*) terkait Program WCP yang dipelajarinya pada saat di Jepang.⁵

Kemiskinan menurut penyebabnya terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau sedikitnya bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka

⁵ Hasil Wawancara dengan Cleaning Leader Program *Waste Collecting Point* Ibu Hayatun Nufus, tanggal 18 Agustus 2020, Pukul 13:50 WIB, di kediaman beliau.

berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain "Seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin. Ini semua berawal dari diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan perempuan tidak memiliki akses, kesempatan, dan kontrol atas pembangunan, serta tidak memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan setara dengan laki-laki.⁶

Kemiskinan perempuan di Gampong Alue Deah Teungoh dapat dikategorikan dalam kemiskinan kultural dan struktural. Dimana dalam konteks penelitian ini penulis ingin mencoba melihat bahwa pemberdayaan melalui WCP itu diasumsikan akan memiliki kemampuan untuk mengatasi kemiskinan kultural dan struktural. Pemberdayaan melalui WCP adalah ruang untuk menggeser kemiskinan kultural dan struktural dengan cara mereka terlibat melalui kegiatan-kegiatan pada WCP tersebut.

Tingkat pendidikan dan pengetahuan perempuan yang relatif rendah dan keterampilan usaha yang sangat sederhana, maka diperlukan rancangan sederhana yang mudah diaplikasikan bagi perempuan Gampong Alue Deah Teungoh, dan proses pengembangan usaha kecil perempuan masih menitikberatkan pada aspek kesulitan modal. Hal ini disebabkan pemahaman dan kesungguhan pihak-pihak terkait dalam mengembangkan pemberdayaan ekonomi perempuan yang belum optimal.

Lewat kegiatan-kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas perempuan, pelatihan keterampilan mengolah sampah plastik menjadi kerajinan tangan dan pelatihan membuat pupuk kompos. Dengan kegiatan seperti ini secara tidak langsung dan bertahap masyarakat akan mendapatkan edukasi serta meningkatkan kapasitas mereka dalam memperbaiki perekonomian keluarga

⁶ Retno Endah Supeni, Maheni Ika Sari, Konsep Pemberdayaan, *Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pengembangan Manajemen Usaha Kecil (Studi Deskriptif Pada Kegiatan Usaha Kecil Ibu-Ibu Desa Wirolegi Kabupaten Jember, Dampingan Pusat Studi Wanita UM Jember)*, Artikel Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi UNIMUS, 2011, hlm. 102

lewat keahlian dan kemampuan yang mereka miliki. Sehingga lewat program WCP maka perlahan dan bertahap masalah pengentasan kemiskinan dapat terurai dan menemukan jalan keluar.

Dengan mengetahui akar kemiskinan itu, akan menolong perempuan untuk keluar dari kemiskinan itu, salah satunya adalah dengan meningkatkan keberdayaan perempuan di bidang ekonomi. Dengan adanya penerapan program *Waste Collecting Point* di Gampong Alue Deah Teungoh memberikan edukasi kepada masyarakat, bahwa dengan adanya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan sampah dapat memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat

Kemudian penulis juga menemukan bahwa sebagian masyarakat menganggap remeh dan mengira bahwa yang namanya sampah hanyalah sampah dan tidak bisa dimanfaatkan sebelum akhirnya dibuang. Adapun bentuk menganggap remehnya ialah seperti tidak mengikuti pengarahannya yang disampaikan, membuang sampah yang seharusnya bisa dipilah sembarangan, lebih memilih membakar dari pada memilahnya terlebih dahulu bahkan hingga membuangnya ke pinggir bagian laut atau membuangnya sembarangan karena dinilai lebih simpel dan hemat waktu.

Sampai kepada program WCP tersebut disosialisasikan dan dijalankan perlahan bermula pada tahun 2015 akhirnya sebagian masyarakat menyadari bahwa dengan memilah sampah residu, plastik, botol, kertas, atom dan botol kaca dapat mempunyai nilai ekonomi dan nilai lingkungan. Kemudian dengan tumbuhnya nilai ekonomi dari program tersebut maka mulailah terbangun ekonomi keluarga khususnya melalui pengembangan dari program WCP adapun pengembangannya berupa pemanfaatan atau penggunaan kembali sampah yang telah dipilah menjadi barang atau alat – alat yang berguna bagi masyarakat, pembuatan pupuk kompos yang nantinya akan digunakan di *field gardening* pada gampong tersebut sehingga gampong

tersebut memiliki produksi sayur – sayuran sendiri yang akan didistribusikan kepada masyarakat gampong tersebut.⁷

Berangkat dari pemaparan kondisi dan data observasi awal yang penulis dapat sebagai bahan awal tentunya penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan terkait bentuk pemberdayaan ekonomi khususnya terhadap ekonomi perempuan melalui pengelolaan sampah berbasis WCP yang mana sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sampah merupakan aspek penting yang dapat menunjang banyak aspek lain khususnya bentuk – bentuk pemberdayaan ekonomi yang dilakukan atau yang diterima oleh kaum perempuan. Pihak perempuan yang dimaksud terbagi menjadi dua yaitu pelaku kegiatan yang seorang perempuan dan objek dari pemberdayaan yang dilakukan atau dikenakan kepada perempuan. Untuk itu penulis merasa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang tertuang melalui penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program *Waste Collecting Point* (WCP) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan (Studi Kasus di Gampong Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraksa, Kota Banda Aceh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Pemberdayaan Ekonomi Melalui Program *Waste Collecting Point* di Gampong Alue Deah Teungoh?
2. Bagaimana Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Perempuan melalui Program *Waste Collecting Point* dalam hal Pemberdayaan Perempuan di Gampong Alue Deah Teungoh?

⁷ Hasil Wawancara dengan Cleaning Leader Program Waste Collecting Point Ibu Hayatun Nufus, tanggal 18 Agustus 2020, Pukul 13:05 WIB, di kediaman beliau.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bentuk Pemberdayaan Ekonomi Melalui Program *Waste Collecting Point* di Gampong Alue Deah Tengah.
2. Untuk memahami Bagaimana Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Perempuan melalui Program *Waste Collecting Point* dalam hal Pemberdayaan Perempuan di Gampong Alue Deah Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan juga semua pihak yang membaca dan yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis diharapkan dapat memperkenalkan secara lebih meluas kepada masyarakat melalui pembaca dan lingkungan akademisi mengenai Program Pengelolaan Sampah Melalui Sistem *Waste Collecting Point*.
2. Dapat memberikan pemahaman kepada pembaca dan juga masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah sebagai bentuk dari menjaga lingkungan dan juga melalui pengelolaan sampah berbasis WCP ini tentunya memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa mengelola sampah secara efisien merupakan hal yang amat penting.
3. Diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat dari desa atau gampong lainnya yang mengalami masalah terkait pengelolaan sampah yang membeludak agar dapat menerapkan sistem pengelolaan sampah yang serupa.
4. Diharapkan dengan mengetahui bentuk pemberdayaan khususnya bagi kaum perempuan dalam hal ekonomi maka dapat menjadikan kaum perempuan untuk bisa terus berkarya dan menginspirasi kaum perempuan lainnya terkait pemanfaatan lingkungan.

E. Definisi Konsep

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami bacaan yang akan penulis lakukan maka perlu kiranya bagi penulis untuk menjelaskan terkait beberapa istilah pada judul penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam membaca dan memahami penelitian ini selanjutnya. Adapun beberapa istilah yang perlu untuk dipahami adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Ekonomi

Secara istilah pemberdayaan terjemahan dari istilah asing yaitu *empowerment* yang bermakna penguatan, atau peningkatan nilai. Secara teknis istilah pemberdayaan juga dapat disamakan dengan kata pengembangan. Karena memberdayakan berarti mengembangkan sesuatu. Kedua kata ini juga jika dilihat maka dalam bahan tertentu memiliki sifat dapat saling ditukar atau dipertukaran atau *interchangeable*.⁸

Dalam pengertian lain, istilah pemberdayaan dan pengembangan juga memiliki makna upaya untuk memperluas horizon pilihan bagi masyarakat yang artinya bahwa masyarakat yang diberdayakan berarti adalah masyarakat yang mampu melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Oleh karena itu masyarakat yang diberdayakan adalah masyarakat yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan – pilihan.⁹

Sedangkan pemberdayaan ekonomi secara termonologi ialah berupa penguatan pemilikan faktor – faktor produksi, penguatan terhadap penguasaan distribusi dan pemasaran, termasuk juga penguatan dalam hal masyarakat untuk mendapatkan gaji atau upah yang memadai atau mencukupi, serta penguatan masyarakat dalam memperoleh informasi, pengetahuan, *skill* atau keterampilan, yang tentunya harus dilakukan dengan meninjau berbagai aspek, baik itu dari segi masyarakatnya sendiri

⁸ Nani Machendrawatih, Agus Ahmad Syafii, *Pengembangan Masyarakat Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, hlm. 42

⁹ Sri Winarni, *Pola Pemberdayaan Pertanian oleh LSM Prakarya di Desa Sumur Genuk Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan*, Surabaya: Skripsi Mahasiswi Fakultas Dakwah Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, IAIN Sunan Ampel, 2010, hlm. 8-9

maupun aspek kebijakan kebijakan lainnya.¹⁰ Menurut Hutomo definisi di atas banyak dipakai oleh kalangan penyelenggara pemerintah.¹¹

Sehingga pemberdayaan Ekonomi dapat dipahami sebagai upaya atau sistem kerja yang valid mengenai pengembangan pilihan – pilihan yang dapat dipilih oleh masyarakat sehingga masyarakat yang menjalani sistem atau bentuk pemberdayaan tersebut dapat memilih atau setidaknya mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan – pilihan, khususnya setelah masyarakat mendapatkan ilmu, pengetahuan, keterampilan, serta gaji yang memadai yang tentunya hal tersebut dapat dicapai dengan menimbang berbagai aspek atau multiaspek. Dalam penelitian ini pemberdayaan ekonomi yang dimaksud adalah khusus yang terdapat atau dijalankan melalui program pengelolaan sampah melalui WCP sebagai perpanjangan tangan dari bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh DLHK3 Kota Banda Aceh.

2. Program *Waste Collecting Point* (WCP)

Program *Waste Collecting Point* atau terjemahannya adalah titik pengumpulan sampah merupakan suatu sistem dalam pengolahan sampah pada sumber atau titik sampah tersebut yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau suatu warga dengan jumlah anggota 20 sampai dengan 30 rumah tangga untuk satu fasilitas *Waste Collecting Point*.¹²

3. Sampah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari

¹⁰ Mohammad Nadzir, Membangun Pemberdayaan Ekonomi di Pesantren, *Economica: Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi Islam*, Vol. VI, Edisi 1, Mei 2015, hlm. 40

¹¹ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*. Makalah Sehari Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan Bappenas, tanggal 06 Maret 2000 di Jakarta. Diakses melalui www.bappenas.go.id, hlm. 6

¹² Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dengan Sistem *Waste Collecting Point*, Bab I, Pasal 1, poin 15.

manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah dapat berasal dari kegiatan manusia, hewan dan alam.¹³

Perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang pesat di daerah perkotaan mengakibatkan daerah pemukiman semakin luas dan padat. Peningkatan aktivitas manusia, lebih lanjut menyebabkan bertambahnya sampah. Faktor yang mempengaruhi 9 jumlah sampah selain aktivitas penduduk antara lain adalah : jumlah atau kepadatan penduduk, sistem pengelolaan sampah, keadaan geografi, musim dan waktu, kebiasaan penduduk, teknologi serta tingkat sosial ekonomi.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Adapun untuk sistematika pembahasan pada penelitian ini maka penelitian ini terdiri dari lima bab yang mana uraian setiap bab adalah sebagai berikut:

Bab I berupa Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep dan ditutup dengan sistematika pembahasan.

Bab II berupa Kajian Kepustakaan yang mana terdiri dari kerangka teoritik yang berupa penjelasan terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya terhadap perempuan, penjelasan terkait sistem pengolahan sampah WCP, kemudian dilanjutkan dengan sub bab mengenai penelitian terdahulu yang relevan.

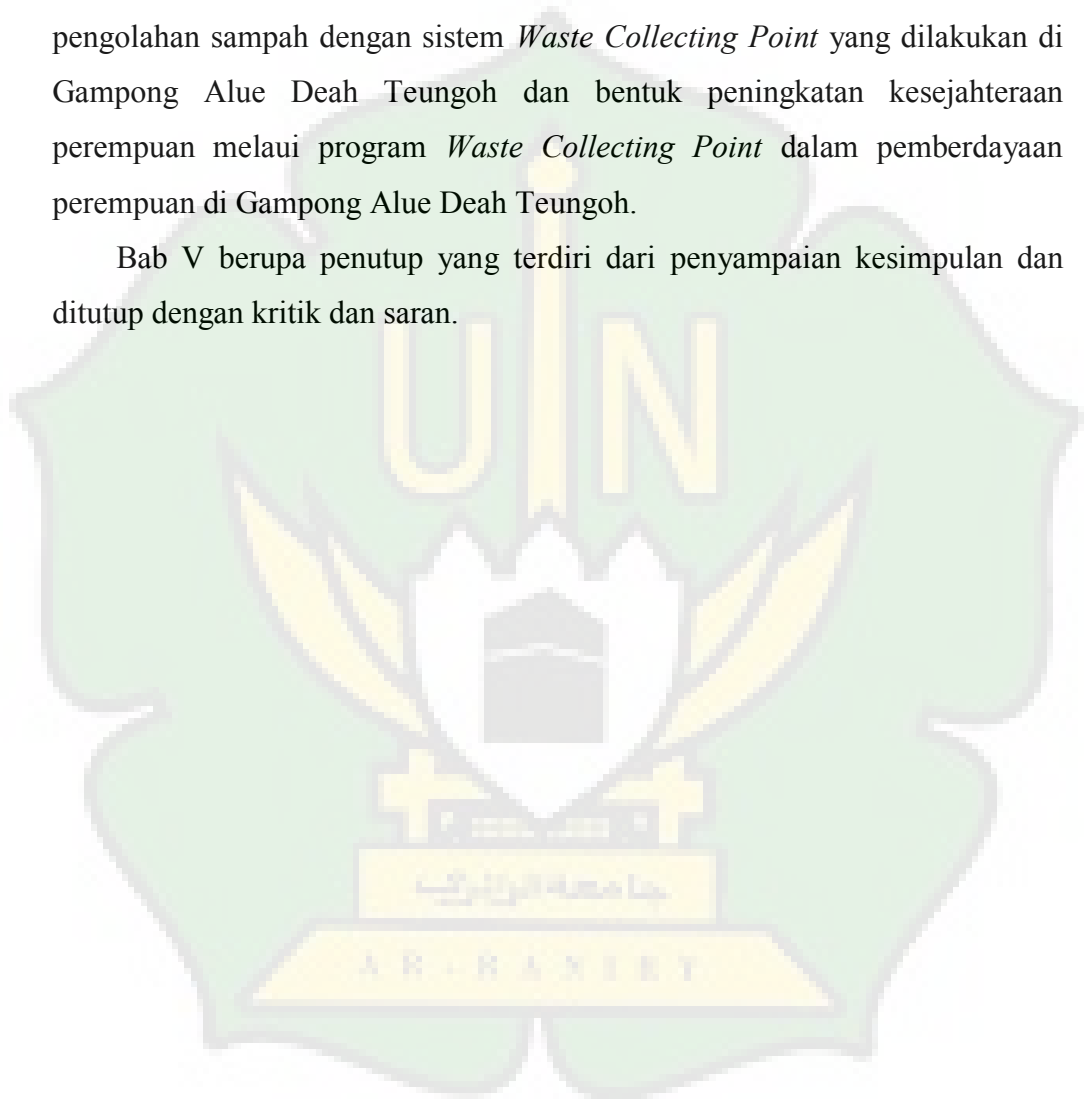
Bab III berupa Metode Penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan ditutup dengan tahapan penelitian.

¹³ Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Bab. I, Pasal 1, poin 1.

¹⁴ Sulistyorini, L. Pengelolaan Sampah Dengan Cara Menjadikannya Kompos, *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol. II, NO. 1, Juli 2005, hlm. 77 – 84.

Bab IV berupa penyajian dan temuan penelitian yang terdiri dari setting penelitian, penyajian data yang berupa geografis gampong, kependudukan, kondisi sosial dan budaya dan struktur organisasi pemerintahan gampong. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan temuan penelitian yang terdiri dari bentuk atau pola pemberdayaan terhadap perempuan melalui program pengolahan sampah dengan sistem *Waste Collecting Point* yang dilakukan di Gampong Alue Deah Teungoh dan bentuk peningkatan kesejahteraan perempuan melalui program *Waste Collecting Point* dalam pemberdayaan perempuan di Gampong Alue Deah Teungoh.

Bab V berupa penutup yang terdiri dari penyampaian kesimpulan dan ditutup dengan kritik dan saran.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan kajian literatur yang penulis lakukan pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan perpustakaan lainnya serta penelusuran virtual melalui *media online* terkait penelitian penulis yang berjudul “**Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program *Waste Collecting Point* (WCP) Di Gampong Alue Deah Tengoh, Kecamatan Meuraksa, Kota Banda Aceh**” maka penulis belum menemukan penelitian atau riset yang sama persis atau dilakukan secara spesifik sebelumnya dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah bersifat asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Setelah melakukan kajian awal, ada beberapa karya ilmiah yang berhasil ditemukan pada perpustakaan UIN Ar-Raniry, yang penulis temukan dan berkenaan dengan penerapan atau pelaksanaan program *Waste Collecting Point*, seperti tulisan atau penelitian yang berjudul “Strategi Komunikasi Edukasi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh (Studi Penerapan Program *Waste Collecting Point* di Gampong Alue Deah Teungoh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh)” yang ditulis oleh Itawarni¹⁵. Dalam skripsi yang ditulis olehnya memang membahas mengenai program WCP tersebut namun pembahasan lebih berfokus kepada strategi komunikasi terkait edukasi program pemerintah terkait WCP ini. hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebab penelitian yang dilakukan penulis lebih menitik fokuskan pada pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kegiatan atau program WCP tersebut. Walau demikian penelitian yang dilakukan oleh Itawarni ini sangat membantu penulis dalam memahami lebih lanjut terkait program WCP ini dan memberikan gambaran

¹⁵ Itawarni, *Strategi Komunikasi Edukasi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh (Studi Penerapan Program Waste Collecting Point di Gampong Alue Deah Teungoh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh)*, Skripsi Mahasiswi Fak. Dakwah dan Komunikasi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2019.

awal mengenai keterkaitan dan penerapan jalur edukasi yang dilakukan oleh dinas terkait mengenai program WCP tersebut.

Kemudian penulis juga menemukan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir Terhadap Pengembangan Ekonomi Komunitas Pemulung (Studi Di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh)” yang ditulis oleh Wirda Yanti¹⁶ dalam skripsi tersebut disebutkan bahwa penelitian yang dilakukan olehnya berfokus pada bentuk pengembangan ekonomi terhadap komunitas pemulung di Gampong Jawa Banda Aceh, walaupun memang bukan membahas mengenai kegiatan WCP namun dalam skripsi tersebut memberikan gambaran lebih jauh terhadap bagaimana salah satu bentuk pengembangan ekonomi yang terjadi dalam ruang lingkup yang bisa dibidang mendekati objek kajian yang diteliti oleh penulis. Sehingga sangat membantu penulis dalam memahami konsep dan aspek pengembangan ekonomi dalam menyelesaikan penelitian skripsi yang dilakukan. Maka jelas bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian yang dilakukan oleh Wirda Yanti sangat berbeda.

B. Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi

1. Definisi

Pemberdayaan secara bahasa ialah proses, cara atau tahapan untuk memberdayakan.¹⁷ Sedangkan asal kata pemberdayaan adalah berdaya yang bermakna berkekuatan, berkemampuan dan atau bertenaga, dan juga berarti mempunyai akal, cara atau segala sesuatunya untuk menyelesaikan sesuatu.¹⁸

Sedangkan secara terminologi istilah pemberdayaan memang tidak lepas dari istilah pengembangan. Pemberdayaan merupakan istilah yang

¹⁶ Wirda Yanti, *Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir Terhadap Pengembangan Ekonomi Komunitas Pemulung (Studi Di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh)*, Skripsi Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Prodi Kesejahteraan Sosial, 2017.

¹⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memberdayakan>, diakses pada Agustus 2020, pada pukul 21:05 WIB.

¹⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/berdaya>, diakses pada Agustus 2020, pukul 21:05 WIB.

diadaptasi dari istilah *empowerment* yang telah berkembang dan terkenal di Eropa lebih tepatnya dimulai pada abad pertengahan yang kemudian mempengaruhi teori – teori yang berkembang selanjutnya.¹⁹ Perlu untuk dipahami juga bahwa istilah pemberdayaan dan pengembangan selalu berkaitan erat atau setidaknya lebih sering berfokus pada aspek masyarakat, sehingga istilah pemberdayaan lebih sering dikenal sebagai suatu usaha memberdayakan suatu elemen atau lapisan masyarakat tertentu.

Pemberdayaan masyarakat sendiri menurut Ife ialah

“Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to ‘work the system,’ and so on.”²⁰

Yang mana bermakna bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses untuk memperbaiki atau menolong suatu aspek lapisan kelompok tertentu ataupun perorangan untuk memiliki daya saing dengan kebutuhan kelompok atau individu lainnya, dengan menolong mereka untuk mempengaruhi atau mengendalikan sesuatu, dengan menggunakan beberapa atau media tertentu, terjun atau terlibat dalam pergerakan aksi politik, dengan tujuan untuk memahami bagaimana cara kerja suatu system tertentu. Menurutnya pemberdayaan lebih kepada peningkatan kualitas skill suatu lapisan masyarakat maupun individu. Sedangkan dalam hal ini yang menjadi acuan adalah khusus dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Jika dilihat dari teknik pemberian daya atau kemampuan ini maka bentuk pemberdayaan tersebut memiliki kecondongan atau kecenderungan yaitu:²¹

a. Kecenderungan Pokok (Primer)

¹⁹ Agus Purbathin Hadi, Konsep Pemberdayaan, *Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan*, Artikel Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA), 2010, hlm. 1

²⁰ Ife, J.W., *Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice*. Melbourne : Longman, 1995.

²¹ Agus Purbathin Hadi, Konsep Pemberdayaan, *Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan*, Ibid., hlm. 2

Kecenderungan pokok atau primer lebih kepada pemberian kemampuan atau kekuasaan terhadap suatu hal baik sebagian atau bersifat keseluruhan kepada suatu individu atau kelompok tertentu dengan tujuan agar individu atau kelompok tersebut menjadi lebih berdaya yang biasanya dilakukan dengan memberikan suatu atau menerapkan fasilitas tertentu yang bersifat membangun kemandirian mereka melalui organisasi tersebut.

b. Kecenderungan Sekunder

Sedangkan kecenderungan sekunder lebih kepada kecenderungan memberikan dorongan berupa motivasi, stimulasi kepada suatu kelompok atau individu agar memiliki kemampuan atau daya untuk menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya yang dilakukan dengan proses dialog.

Walaupun kecenderungan dalam keberdayaan atau memberikan berdaya tersebut terkesan memiliki konsep yang berbeda, namun harus dipahami bahwa seringkali untuk menerapkan atau mewujudkan kecenderungan primer atau pokok diperlukan kecenderungan sekunder sebagai stimulan awal terlebih dahulu.²²

Menurut Chambers pemberdayaan masyarakat ialah suatu konsep atau rencana termasuk pergerakan terkait pembangunan ekonomi yang merangkum nilai – nilai sosial dari suatu kelompok atau individu, yang lebih tepatnya pembangunan ini bersifat *people centred*, *participatory* (partisipasi), *empowering* (pembangunan berdaya), and *sustainable* (kestabilan ketahanan).²³

Pemberdayaan masyarakat yang juga bermakna pembangunan ekonomi masyarakat yang mana menurut Raharjo pembangunan masyarakat ini diartikan sebagai suatu pergerakan atau aktivitas masyarakat

²²Agus Purbathin Hadi, Konsep Pemberdayaan, *Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan*, hlm., 2. Lihat juga Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Jakarta: Gramedia, 1999.

²³Agus Purbathin Hadi, Konsep Pemberdayaan, *Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan*, hlm., 2. Lihat Juga Chambers, *Rural development : putting the last first*. London ; New York: Longman, 1985

dalam hal kemampuan dalam mengidentifikasi kebutuhan (*needs*) dan masalah secara stabil dan teratur.²⁴

Sedangkan menurut Zamhariri seperti yang dikutip oleh Andi Nur Graha bahwa Pembangunan masyarakat merupakan suatu kegiatan terencana dalam upaya untuk menciptakan suatu kondisi berupa kemajuan dalam hal ekonomi di suatu lapisan masyarakat melalui peningkatan partisipasi (*participatory*).²⁵

Menurut Erni Febrina, pemberdayaan masyarakat itu sendiri adalah suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar memiliki kemampuan dalam berbuat sesuatu sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan berbagai hak dan kewajiban mereka sebagai komunitas manusia serta warga negara dengan tujuan pulihnya nilai-nilai manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai suatu pribadi yang unik, merdeka, dan mandiri.²⁶

Berdasarkan beberapa pemaparan definisi yang dikemukakan di atas maka dapat dipahami bahwa pemberdayaan masyarakat sejalan dan sering disamakan dengan terminologi pengembangan serta pembangunan yang berdaya, yaitu suatu upaya pemberian daya atau usaha atau kemampuan yang dilakukan oleh suatu pihak kepada kelompok masyarakat atau individu tertentu dengan tujuan pembangunan dan pemberian kemampuan dalam menetapkan pilihan lebih layak dan banyak kepada penerima pemberdayaan agar menjadi kelompok masyarakat atau individu yang lebih mampu dalam menetapkan pilihan sehingga dapat terwujudnya suatu pembangunan sebagai pelaksanaan dari ciri manusia yang memiliki harkat dan martabat dan bagian dari suatu warga negara.

²⁴Andi Nur Graha, Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi, *Jurnal Ekonomi MODERNISASI*, Vol. 5, No. 2, Juni 2009, hlm. 119. Daikses melalui www.academia.edu, pada Agustus 2020. Lihat juga Raharjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

²⁵Andi Nur Graha, Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi, *Jurnal Ekonomi MODERNISASI*, Ibid., hlm. 119.

²⁶Erni Febrina Harahap, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh Dan Mandiri, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 3, No. 2, Mei 2012, hlm. 78 – 79.

2. Konsep Pemberdayaan

Terkait dengan hal ini, sebenarnya sangat banyak konsep – konsep yang telah berkembang sejak istilah pemberdayaan masyarakat menyebar luas di Eropa. Namun konsep – konsep tersebut memanglah hanya bersifat subjektif, maksudnya ialah tergantung kepada dalam aspek apa pemberdayaan akan dilakukan.

Jika merujuk pada pengertian yang dikemukakan oleh Chambers yang telah disampaikan sebelumnya, maka secara umum konsep pemberdayaan masyarakat memiliki empat konsep dasar umum yaitu:

a. *People Centered* (Pemusatan atau Bertitik Fokus Pada Masyarakat);

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan – pemberdayaan dalam hal lain tentunya pasti kegiatan pemberdayaan tersebut bersifat terpusat atau fokus. Sebagai contoh dalam pembangunan masyarakat tidak hanya berpusat pada ekonomi tapi lebih kepada kemampuan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan *people centered* di sini memiliki terminologi yang lebih kepada pemusatan kegiatan kepada masyarakat atau menjadikan masyarakat sebagai inti dari pihak yang akan diberdayakan.

b. *Participatory* (Partisipasi atau Pengikut Sertaan);

Pada konsep *Participatory* atau partisipasi ini lebih kepada penekanan bahwa dalam melakukan pemberdayaan tentunya sangat dibutuhkan dan diperlukan kepada masyarakat yang akan diberdayakan untuk ikut serta secara langsung baik karena partisipasi merupakan poin penting dalam menjamin masyarakat yang akan diberdayakan untuk benar – benar mampu nantinya menentukan pilihan dalam hidupnya. Kemudian setelah memastikan keikutsertaan masyarakat nantinya pihak yang akan melakukan pemberdayaan memberikan pemberdayaan – pemberdayaan yang diperlukan, bisa itu bersifat primer maupun sekunder sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

- c. *Empowering* (Pembangunan Berdaya atau Peningkatan Mutu Daya);
Konsep *Empowering* ini bermaksud bahwa dalam upaya pemberdayaan yang akan dilakukan maka kegiatan yang sebelumnya harus bersifat di titik fokuskan kepada masyarakat juga perlu untuk bersifat partisipasi untuk masyarakat maka selanjutnya adalah juga harus bersifat pembangunan atau pengembangan kualitas sehingga masyarakat atau individu yang diikutkan program perkembangan masyarakat akan memiliki nilai dan daya guna lebih tinggi dari sebelumnya. Dan konsep ini merupakan inti atau titik klimaks dari suatu kegiatan perkembangan masyarakat yang dengan kata lain apabila masyarakat yang diikutsertakan dalam kegiatan tersebut jika nilai daya atau kualitasnya tidak meningkat atau tidak menjadi lebih berdaya guna maka bisa dikatakan tidaklah benar – benar mengikuti kegiatan perkembangan pemberdayaan masyarakat atau individu.
- d. *Sustainable* (Keberlanjutan);
Kemudian konsep keberlanjutan sebenarnya merupakan konsep yang tidak kalah penting dengan konsep sebelumnya. Namun hal ini terkadang menjadi kendala terbesar dalam menjalankan kegiatan pemberdayaan. Yang mana konsep keberlanjutan tidak hanya ditekankan kepada pihak penyelenggara namun juga kepada pihak masyarakat atau kelompok atau individu yang menjalani kegiatan tersebut. Adapun bentuk keberlanjutan bisa dalam bentuk nampaknya hasil pasti, menyebarnya pemahaman atau ilmu terkait pemberdayaan, hingga menjadi penerus atau konseptor selanjutnya.

3. Aspek – Aspek Penunjang Pemberdayaan Ekonomi

Dalam melakukan pemberdayaan khususnya dalam hal ekonomi setelah penyusunan mengenai konsep pemberdayaan yang ideal, maka selanjutnya terdapat beberapa faktor atau aspek yang menjadi penunjang pemberdayaan ekonomi. Faktor yang dimaksud lebih bermakna sektor atau

posisi di mana dengan menjamin beberapa faktor yang dimaksud maka keberlanjutan dari pemberdayaan yang dilaksanakan berdasarkan konsep dasar atau unsur yang telah dijelaskan sebelumnya dipastikan dapat terwujud secara ideal.

Adapun beberapa faktor tersebut yang dimaksud sebenarnya sangatlah luas dan banyak karena sebenarnya konsep dasar dari pemberdayaan atau pembangunan tidak hanya harus diterapkan kepada suatu kegiatan ekonomi saja, namun bisa juga kepada beberapa jenis kegiatan lain yang tentunya masih sejalan dengan terminologi pemberdayaan itu sendiri. Walau demikian, masih dapat kita jabarkan dan ketahui dengan melihat dan menelaah perkembangan terminologi dari pemberdayaan itu sendiri dan juga beberapa pendapat para ahli. Adapun beberapa faktor umum yang dimaksud adalah sebagai berikut:²⁷

a. Sumber Daya Manusia;

Human resource atau sumber daya manusia menjadi titik fokus pemberdayaan manusia dilaksanakan. Sebab kualitas dari sumber daya manusia menjadi penentu utama perkembangan berdaya khususnya dalam hal ekonomi. Kurangnya kualitas dari tenaga kerja yang dimiliki suatu daerah atau kawasan maka akan menjadi faktor penghambat utama dalam usaha melakukan pemberdayaan.

Lonni dkk. dalam penelitiannya menyebutkan bahwa banyak variabel yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat sumber daya manusia, salah satunya ialah pendidikan, menurutnya jika dilihat secara numerik maka kenaikan jumlah dan presentase tenaga kerja yang berpendidikan tinggi maka pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja akan semakin baik, sehingga pengetahuan yang dimiliki yang didasari pada tingkat pendidikan yang tinggi yang dimiliki seseorang

²⁷ Yuli, Artikel 10 Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Ekonomi, 2019. Diakses melalui: <https://www.dosenekonomi.com/>, pada Agustus 2020

di suatu wilayah dikatakan mampu dalam mengorganisasi pekerjaan secara efektif sehingga menghasilkan nilai produksi yang tinggi.²⁸

b. Sumber Daya Alam;

Natural Resource atau sumber daya alam menjadi fokus selanjutnya, sebab ini juga menjadi faktor pendukung dalam menjamin pertumbuhan nilai ekonomi yang dimaksud. Sumber daya alam terdiri dari berada di darat dan laut. Sumber daya alam yang terdapat di darat dapat berupa yang bersumber dari dalam tanah, gunung, hutan dan dapat berupa tambang, mineral, papan, bahan bakar fosil, baik berupa unsur padat, cair hingga gas. Sedangkan sumber daya alam yang terdapat pada laut dapat berupa tambang, dan makhluk hidup yang terdapat di sana, yang bisa berupa minyak (yang berasal dari binatang hidup), berbagai macam obat nilai garam dan lain sebagainya.

Menurut Badriyah Djula dalam penelitiannya²⁹ yang ia kutip menurut Shirley Walter Allen macam – macam sumber daya alam dapat digolongkan sebagai berikut:³⁰

- 1) Sumber daya alam yang tidak dapat diganti (*inexhaustible natural resources*), ini mencakup udara, energi matahari, dan air hujan.
- 2) Sumber daya alam yang dapat diganti atau diperbaharui dan dipelihara. Ini meliputi air yang ada di tempat seperti danau, laut dan sebagainya, kualitas tanah, hutan dan marga satwa atau sejenisnya.

²⁸ Lonni, Tahir Kasnawi, Paulus Uppun, *Influence Quality Human Resource to Growth of Economics in Sub-Province of Mamasa (Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mamasa)*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan: (Kajian Ekonomi Negara Berkembang)*, JEP. Vol. 7, No. 2, 2002, hlm. 114. Diakses dari <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/4013e72702847521673251f61042c080.pdf>, pada Agustus 2020, pukul 22.00 WIB.

²⁹ Badriayyah Djula, Sumber Daya Alam dan Pertumbuhan Ekonomi, *dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo*, 2013. Diakses dari https://repository.ung.ac.id/get/simlit_res/1/366/, pada Agustus 2020, pukul 22.00 WIB.

³⁰ Suparmoko Irawan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: Rajawali, 1992, hlm. 103.

- 3) Sumber daya alam sumber daya alam yang tidak dapat diganti (*irreplaceable or stock natural resource*). Ini mencakup sumber daya mineral seperti logam, minyak bumi dan batu bara.

Namun harus dipahami bahwa ketersediaan sumber daya alam memang menjadi jaminan pengembangan dan pemberdayaan di suatu wilayah, namun kembali kepada kualitas dari sumber daya manusia yang menjadi pengolah atau yang mengolah sumber daya alam tersebut. Melimpahnya sumber daya alam akan menjadi sia – sia atau tidak dapat dimanfaatkan dalam pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi jika sumber daya manusia atau kualitas manusianya masih rendah atau tidak mampu mengolahnya. Oleh karena itu faktor pendidikanlah yang kembali menjadi penentu sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Singkatnya pemfaatan sumber daya alam didukung oleh perkembangan kualitas manusia yang efisien dan teknologi yang canggih.

c. Formasi Modal;

Hal ini melibatkan tanah, bangunan, mesin, listrik, transportasi, dan media komunikasi sebagai sarana sosialisasi. Memproduksi dan memperoleh semua produk buatan manusia ini disebut sebagai pembentukan modal. Pembentukan modal yang sesuai akan meningkatkan ketersediaan modal pekerja, yang selanjutnya meningkatkan rasio modal/ tenaga kerja. Sehingga, produktivitas tenaga kerja meningkat, yang akhirnya menghasilkan peningkatan output dan pertumbuhan ekonomi yang sesuai pula.

d. Pengembangan Teknologi;

Pengembangan teknologi ialah salah satu faktor penting yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan dalam hal ekonomi. Teknologi yang dimaksud melibatkan penerapan metode ilmiah dan teknik produksi. Dengan kata lain, teknologi dapat diartikan sebagai

sifat dan jenis instrumen teknis yang digunakan oleh sejumlah tenaga kerja tertentu sebagai penunjang faktor sumber daya alam sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Pengembangan teknologi yang mumpuni membantu dalam meningkatkan produktivitas dengan jumlah sumber daya yang terbatas. Negara-negara yang telah bekerja di bidang pengembangan teknologi berkembang pesat seperti Jepang, Jerman, Rusia dan lain sebagainya jika dibandingkan dengan berbagai negara lain yang kurang fokus pada pengembangan teknologi. Selain itu pemilihan pengembangan teknologi yang tepat juga memainkan peran bagi pemberdayaan ekonomi. Sebaliknya, pengembangan hingga penggunaan teknologi yang tidak tepat akan menghasilkan biaya produksi yang tinggi yang tentunya mempengaruhi nilai atau hasil yang diperoleh sehingga berimbas pada pengembangan nilai ekonomi yang terhambat hingga menurun.

e. Faktor Sosial dan Politik;

Faktor ini memiliki peran penting dalam pengembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Faktor-faktor sosial yang dimaksud ialah seperti kebiasaan, tradisi, nilai-nilai dan keyakinan, yang memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi sampai pada batas tertentu. Sebagai contoh, masyarakat yang bermukim disekitar pantai notabeneanya akan berprofesi menjadi profesi apapun yang berlatang belakang laut laut sebagai sumber pengembangan ekonominya. Dan juga didukung oleh kebiasaan, tradisi, nilai-nilai dan keyakinan para leluhurnya yang telah lama atau menggunakan laut sebagai penunjang ekonomi mereka.

Terlepas dari itu, faktor – faktor politik, mengambil peran sebagai partisipasi pemerintah dalam merumuskan dan menerapkan berbagai kebijakan, yang berkaitan dengan pengembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jika pemerintah menerapkan aturan kebijakan

yang sesuai dengan nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat maka akan menjadi penunjang nilai pemberdayaan yang hendak dilakukan begitu juga sebaliknya jika tidak sesuai dengan kebiasaan, tradisi, nilai-nilai dan keyakinan masyarakat maka pemerintah sendiri yang akan menjadi penghambat proses pemberdayaan akan dilakukan.

f. Suku Bunga;

Hal ini dapat menjadi faktor sebab suku bunga dapat mempengaruhi pertumbuhan industri dalam beberapa cara. Dalam industri besar seperti pabrik kendaraan atau perusahaan pelayaran atau ketersediaan pupuk sebagai salah satu kebutuhan primer masyarakat Indonesia, kenaikan suku bunga dapat mencegah pelanggan dari meminjam untuk membiayai pembelian jenis produk dan layanan ini.

Sebaliknya suku bunga yang tinggi juga menghalangi perusahaan untuk berinvestasi dalam modal baru dan ekspansi. Di sisi lain, penurunan suku bunga dapat mendorong industri untuk tumbuh, yang dapat mengarah pada inovasi dan tingkat pekerjaan yang lebih tinggi yang tentunya menunjang pemberdayaan dan pertumbuhan masyarakat terlebih yang berfokus pada ekonomi.

g. Kekuatan Mata Uang;

Nilai mata uang menjadi faktor tersendiri dalam pemberdayaan ekonomi, sebagai contoh, nilai mata uang Amerika Serikat yaitu dolar Amerika secara langsung memegang kendali pada perkembangan pasar dunia sebagai satuan nilai tukar, perputaran nilai mata uang rupiah Indonesia jika tidak mampu mengikuti perputaran nilai mata uang Dolar Amerika ini tentunya akan berimbas pada jatuhnya nilai mata uang Indonesia sehingga berakibat pada ketidakmampuan Indonesia dalam mengikuti pasar dunia. Buruknya seperti kasus krisis moneter yang terjadi pada masa reformasi.

h. Intervensi Pemerintah;

Faktor ini lebih kepada keterkaitan pemerintah dalam mengolah sumber – sumber pengembang sumber daya alam dan manusia. Dalam pemerintahan sendiri terdapat menteri khusus yang menangani masalah pengembangan ini yang dituangkan pemerintah dalam wadah bernama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai industri pemerintah. Tentu pihak pemerintah memiliki standar tersendiri dalam pengolahan semua operator dalam industri harus yang mengikuti standar tersebut untuk keselamatan konsumen, karyawan, atau sumber daya alam yang dimiliki. Ketidakseimbangan penerapan standar dan campur tangan pemerintah dari satu industri ke industri lainnya tentu dapat memberikan guncangan terhadap pemberdayaan ekonomi yang ditampung dalam wadah industri tersebut yang berakibat pada tertekannya angka pertumbuhan. Jika pemerintah tidak menyesuaikan intervensi yang dilakukan maka konsep *suitability* tidak akan terwujud.

i. Dampak Lingkungan;

Dampak lingkungan terdiri dari beberapa jenis yaitu faktor alam lain seperti bencana alam, perubahan iklim dan keadaan alam lainnya dan juga keadaan lingkungan tempat pemberdayaan akan dilakukan.

C. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Perlu untuk dipahami bahwa perempuan merupakan salah satu anggota penting dalam suatu satuan organisasi bahkan hingga yang terkecil yaitu keluarga. Karena perempuan potensi keluarga yang memiliki semangat namun tak berdaya sehingga dalam beberapa kasus tentu perlu untuk diberdayakan. Terkait pemberdayaan perempuan ini sendiri menurut Bambang Susilo yang ia kutip menurut Karl terdapat lima dimensi atau aspek khusus yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:³¹

³¹ Bambang Susilo, Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Tani Berbasis Kelembagaan, *Muwazah*, Vol. 2, No. 2, Desember 2010, hlm., 291.

1. Dimensi Kesejahteraan; yaitu melalui terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, perumahan dan sebagainya sejauh mana dinikmati oleh laki-laki dan perempuan,
2. Dimensi Akses; akses yang dimaksud yaitu akses untuk menggunakan fasilitas yang memadai, tenaga kerja, kredit, informasi hingga keterampilan tertentu.
3. Dimensi Kesadaran; yang merupakan dimensi dalam hal pengembangan nilai pikir kritis dalam upaya penyadaran adanya kesenjangan gender karena faktor sosial budaya yang sifatnya bisa dirubah. Kesenjangan terjadi karena adanya anggapan bahwa posisi sosial ekonomi perempuan lebih rendah dari laki-laki, sehingga peyadaran berarti penumbuhan sikap kritis.
4. Dimensi Partisipasi; yang ditunjukkan dengan tidak terwakilinya kelas bawah dalam lembaga-lembaga yang terkesan elit lebih tepatnya pemberdayaan di sini lebih mengarah kepada pengorganisasian perempuan (kelembagaan) agar dapat berperan dalam proses pengambilan keputusan dan kepentingan mereka sendiri.
5. Dimensi Kontrol; yang dapat dilihat dari kesenjangan alokasi kekuasaan antara perempuan dan laki-laki disegala bidang. Dalam hal penguasaan alat – alat kerja, tenaga kerja, pembentukan modal dan lain-lain. Pemberdayaan di sini diarahkan pada alokasi kekuasaan atau kontrol yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Kelima dimensi diatas sebetulnya merupakan bentuk perkembangan teori yang berasal dari konsep yang berkembang di Eropa sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Perkembangan kajian ini tentunya terjadi karena reaksi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri menghadapi perubahan dan gejolak negara yang tentunya mempengaruhi keberlangsungan kaum – kaum kelompok tertentu tidak terkecuali kaum perempuan. Menurut Bambang Susilo sebagaimana yang ia kutip dari Kartasasmita bahwa konsep tersebut merupakan perkembangan dari konsep – konsep umum sebelumnya.

Menurutnya makna dari perkembangan perempuan tetaplah sama yaitu membangun daya, dengan mendorong, memotivasi hingga membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimiliki perempuan tersebut, serta adanya upaya mengembangkan ke arah yang lebih baik.³²

Perlu untuk dipahami bahwa proses pemberdayaan perempuan memerlukan perencanaan yang tersusun secara matang dan jelas terlebih dalam hal mobilitas sumber daya yang diperlukan. Pada dasarnya penerapan demokrasi pada program perempuan sama dengan penerapan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga pada intinya kembali lagi kepada pengembangan dana (modal), sumber daya manusia, teknologi dan organisasi atau kelembagaan terkait.

Kelima dimensi diatas juga selaras sebagaimana yang dijelaskan oleh Naila Kabeer dalam risetnya bahwa menurutnya kelima dimensi tersebut lebih kepada unsur yang jika dipahami secara bahasa maka kelima unsur tersebut haruslah terpenuhi semuanya yang barulah kemudian kegiatan tersebut bisa dikatakan sebagai pemberdayaan ekonomi perempuan. Kelima unsur tersebut disebutkan berupa *Welfare* bermakna kesejahteraan, *Access* yang berarti akses, *Consientisation* yang bermakna pemahaman terkait perbedaan peran dari laki – laki dan perempuan, *Participation* yang berarti keikutsertaan atau partisipasi dan *Equality of Control* yang bermakna kesetaraan dalam hal pemanfaatan daya dan kekuasaan.³³

Pada unsur *Welfare*, Naila menambahkan bahwa terdapat pembagian aspek berdasarkan unsur tersebut yaitu aspek partisipasi ekonomi perempuan, pencapaian pendidikan dan kesehatan serta kesejahteraan. Partisipasi ekonomi

³² Bambang Susilo, Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Tani Berbasis Kelembagaan, *Ibid.*, hlm., 292

³³ Retno Endah Supeni. Maheni Ika Sari, Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pengembangan Manajemen Usaha Kecil (Studi Diskriptif Pada Kegiatan Usaha Kecil Ibu-Ibu Desa Wirolegi Kabupaten Jember, Dampingan Pusat Studi Wanita Um Jember), *Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan*, Fakultas Ekonomi, UNIMUS, 2011, hlm. 104. Diakses dari www.academia.edu. Lihat Juga Naila Kabeer, *Reflections on The Measurement of Women's Empowerment in Discussing Women Empowerment: Theory and Practices*. Journal of Sida Studies No.3. 2001.

perempuan lebih kepada langkah penting untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga dan mendorong pembangunan ekonomi negara secara keseluruhan. Aspek pencapaian pendidikan merupakan aspek yang paling menjadi titik rawan dalam pengembangan nilai kesejahteraan, sebab tanpa memperoleh pendidikan yang memadai, perempuan tidak mampu mengakses pekerjaan sektor formal, mendapatkan upah yang lebih baik hingga seterusnya. Pada aspek kesehatan dan kesejahteraan merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan perbedaan dengan makna terminologi tertentu antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses nutrisi yang cukup, kesehatan, fasilitas reproduksi dan untuk mengemukakan dan mendapatkan keselamatan fundamental dan integritas seseorang.³⁴

Penulis setuju dengan kelima dimensi di atas, namun adanya penambahan Dimensi Ruang kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi perempuan. Dikutip dalam Argumen Lefebvre dalam bukunya, *The Production of Space* adalah ruang sebagai produk sosial, atau konstruksi sosial yang kompleks (berdasarkan nilai dan produksi sosial atas makna) yang mempengaruhi praktik ruang dan persepsi atas ruang. Ruang (sosial) adalah produksi sosial – ruang di produksi sebagai cara tertentu yang menjadi alat berpikir dan bertindak. Ruang tidak hanya berarti sebagai produksi namun juga sebagai alat kontrol dan untuk kemudian mendominasi (kekuasaan). Dengan adanya dimensi ruang pemberdayaan perempuan memiliki akses yang dapat mempengaruhi kekuasaan atau kebijakan serta berkembang ke arah yang lebih baik³⁵

³⁴ Naila Kabeer, *Reflections on The Measurement of Women's Empowerment in Discussing Women Empowerment: Theory and Practices*. Journal of Sida Studies No.3. 2001. Lihat juga Linda Mayoux, *Gender Equity, Equality, and Women's Empowerment. Principle, Development and Framework*, Aga Khan Foundation, 2001. Diakses dari situs <http://www.genfinances.net>.

³⁵ Djaja Hendra, Analisis Pemikiran Henri Lefebvre Tentang Ruang Dalam Arsitektur Modern: Suatu Perspektif Sosiologis, dalam *Jurnal Universitas Negeri Jakarta*. Diakses dari <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jmb/article/download/9092/6203> , pada Januari 2021, Pukul 11.00 WIB.

D. Kesejahteraan Masyarakat

Memahami konsep kesejahteraan masyarakat tidak hanya dilihat dari sisi absolut atau dengan kata lain dari sisi kesejahteraan ekonomi semata. Walaupun aspek atau faktor menjadi faktor paling besar dalam melihat dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena bervariasinya konsep kesejahteraan di masyarakat memiliki ruang akan pemahaman kesejahteraan secara kolektif dan relatif.

Makna kolektif bisa dipahami dengan kepada siapa dan oleh siapa (*Who*) kesejahteraan ini diukur, sedangkan relatif bermakna aspek atau hal atau bagaimana (*What, Who dan How*) aspek ini dilihat.

Konsep kesejahteraan juga tidak bisa dilepas atau dipisahkan dari kualitas hidup masyarakat, di mana kualitas hidup masyarakat dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik dan yang paling besar ialah kembali ke kondisi ekonomi masyarakat tersebut. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa kesejahteraan dewasa ini bisa diukur atau diamati menggunakan prinsip SWOT atau pun prinsip lainnya sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya dan tentunya tidak hanya terbatas pada ukuran *Income* saja.³⁶

1. Indikator Kesejahteraan

Indikator Kesejahteraan Masyarakat menurut BPS menyarankan tujuh aspek atau komponen pengukur kesejahteraan itu sendiri, yaitu:³⁷

a. Kependudukan

Salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup jumlah, komposisi dan distribusi penduduk. Sebenarnya, jumlah penduduk yang besar merupakan modal dasar yang sangat penting. Namun

³⁶ Astriana Widyastuti, Analisis Hubungan Antara Produktifitas pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009, *Economics Development Analysis Journal (EDAJ)*, Vol. 1, hlm. 3, Tahun 2012. Diakses melalui: <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/472/>. Pada Desember 2020

³⁷ BPS, *Indikator Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta: BPS, 2006

apabila pertumbuhan, dan persebarannya tidak teratur, maka jumlah penduduk yang besar dapat menjadi beban pembangunan.³⁸

b. Kesehatan dan Gizi

Pembangunan di bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu komponen dari indikator kesejahteraan rakyat yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Selain itu, pendidikan juga merupakan sarana untuk membentuk manusia yang terampil, berbudi pekerti yang baik, serta produktif. Dengan demikian, pada akhirnya pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pendidikan tercermin dalam Undang- Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

d. Ketenagakerjaan

Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat menyebabkan jumlah angkatan kerja yang tersedia juga meningkat. Namun, peningkatan jumlah angkatan kerja ini apabila tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan pekerjaan akan menyebabkan bertambahnya pengangguran, dan peningkatan pengangguran dapat menimbulkan permasalahan sosial di masyarakat yang pada akhirnya menghambat keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

e. Taraf Pola Konsumsi

Pola pengeluaran rumah tangga dapat dipakai untuk menjadi alat penilaian tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dan perubahan

³⁸BPS Kabupaten Pasangkayu, Indikator Kesejahteraan Kabupaten Pasangkayu, Mamuju: Cv. Mitra Karya, 2018

komposisi pengeluarannya sebagai indikasi perubahan tingkat kesejahteraan. Umumnya, rumah tangga yang masih berpenghasilan rendah akan mendahulukan konsumsi makanan dibanding konsumsi non makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola pengeluaran yang tadinya lebih mengutamakan pengeluaran untuk makanan menjadi pengeluaran untuk non makanan.

f. Perumahan dan Lingkungan

Selain kebutuhan pangan dan sandang, kebutuhan pokok manusia yang tidak kalah pentingnya adalah kebutuhan papan atau rumah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Sementara itu, definisi perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Selain sebagai tempat tinggal, rumah juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Semakin tinggi status sosial seseorang, maka semakin besar kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik, begitu pun sebaliknya. Permintaan terhadap rumah akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, karena rumah merupakan kebutuhan dasar bagi manusia di samping pakaian dan makanan. Meningkatnya permintaan rumah harus diimbangi dengan penyediaan akan kebutuhan perumahan bagi penduduk.

g. Sosial Budaya

Selain berupaya untuk memenuhi kebutuhan primer berupa sandang, papan, dan pangan, manusia juga berupaya untuk memenuhi kebutuhan sekunder yang antara lain dapat berupa hiburan, bepergian

untuk berbagai tujuan, akses terhadap informasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Perkembangan zaman yang semakin pesat membuat manusia perlu menyesuaikan diri. Oleh karena itu, saat ini tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan primer saja, akan tetapi juga kebutuhan sekunder lainnya. Aspek-aspek sosial lainnya juga dapat menjadi indikator kesejahteraan penduduk, misalnya akses pada teknologi informasi dan komunikasi, bepergian untuk wisata, serta keamanan dan keselamatan dari kejahatan.

2. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dari Kesejahteraan Masyarakat lebih mudah dilihat dari segi yang melakukannya. Dengan kata lain faktor pendukung bermakna faktor tidak langsung yang mempengaruhi kesejahteraan tersebut. Sedangkan secara khususnya bisa dilihat dari atau berdasarkan indikator di atas.

Sebagai contoh jika menilik atau ingin mengukur indeks atau indikator dari suatu pemberdayaan ekonomi maka yang menjadi faktor pendukung yang langsung adalah pembangunan ekonomi itu sendiri atau pendidikan dan lain sebagainya. Sedangkan yang menjadi faktor pendukung tidak langsung adalah kesadaran pihak berwenang dalam hal tersebut.

E. Program *Waste Collecting Point*

1. Definisi

Definisi dari *Waste Collecting Point* dapat dipahami melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dengan Sistem *Waste Collecting Point*, Bab I, Pasal 1 poin 15 yang berbunyi suatu sistem dalam pengelohan sampah pada sumber atau titik sampah tersebut yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau suatu warga dengan jumlah

anggota 20 sampai dengan 30 rumah tangga untuk satu fasilitas *Waste Collecting Point*.

Program ini sendiri umumnya dapat dipahami merupakan kegiatan atau program yang mengharuskan setiap keluarga untuk bijak dalam memilah dan memisahkan sampah secara mandiri baru kemudian sampah – sampah tersebut diolah dengan tujuan dan sasaran berkurangnya timbunan sampah dan terjaganya kebersihan dan keindahan suatu daerah.

Adapun struktur dari program pengolahan sampah berbasis WCP ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 poin (2) dan penjelasannya terdapat pada poin selanjutnya (3) yaitu sebagai berikut:

- a. Pembina; ialah pihak yang bertanggung jawab pemegang kebijakan gampong dan memastikan berjalannya kegiatan WCP sesuai aturan yang berlaku.
- b. Pengawas; ialah pihak yang mengawasi kegiatan WCP.
- c. *Cleaning Leader*; ialah pihak yang bertugas melaksanakan kegiatan WCP sesuai dengan tata laksana yang telah ditetapkan oleh Dinas, dan mengarahkan pengelola dan anggota WCP dalam kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah gampong.
- d. Ketua; ialah pihak yang bertugas memimpin dan mengarahkan para anggota WCP dalam pelaksanaan kegiatan WCP.
- e. Anggota; ialah pihak yang bertugas dalam mengumpulkan dan memilah sampah di titik WCP.
- f. Fasilitator Sentra Produksi; ialah pihak yang bertugas untuk mengkoordinir anggota dan melaksanakan kegiatan pengolahan sampah di Gampong agar bernilai ekonomis.

2. Sistem Pengolahan Sampah

Adapun untuk sistem pengolahan sampah pada program WCP ini terdiri dari tiga tahap yang kesemua tahap ini telah dijelaskan dengan sangat rinci di dalam Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

dengan Sistem *Waste Collecting Point*, yang ketiga tahapan tersebut terdiri dari

a. Tahap awal berupa Pelaksanaan Pengolahan Sampah Dengan Sistem WCP yaitu:³⁹

- 1) Permintaan Gampong untuk penerapan pengelolaan sampah sistem *Waste Collecting Point* (WCP) kepada Dinas;
- 2) Sosialisasi Pengelolaan Sampah Sistem WCP oleh Dinas;
- 3) Penandatanganan MoU Pelaksanan Pengelolaan Sampah Sistem WCP antara Kepala Dinas dengan Keuchik;
- 4) Pembentukan struktur Tim Pengelola WCP dan Pembentukan Kelompok Sentra Produksi;
- 5) Pemetaan lokasi titik WCP oleh aparatur gampong didampingi petugas dari Dinas;
- 6) Survey kelayakan lokasi titik WCP oleh Dinas;
- 7) Penyusunan rencana anggaran pengelolaan sistem WCP oleh aparatur gampong berdasarkan hasil survey dan pemetaan;
- 8) Peletakan sarana dan prasarana pada titik WCP;
- 9) Sosialisasi pelaksanaan teknis pengelolaan sampah sistem WCP;
- 10) Pembinaan *cleaning leader* dan Sentra Produksi;
- 11) Pelaksanaan pengelolaan sampah dengan sistem WCP
- 12) Monitoring dan Evaluasi;

b. Tahap Sosialisasi

- 1) Dinas melakukan sosialisasi pengelolaan sampah sistem WCP, seperti teknis pemilahan sampah di rumah, penanganan/perlakuan sampah di titik WCP dan pengelolaan sentra produksi;
- 2) Waktu dan jadwal sosialisasi diatur menurut kebutuhan gampong berdasarkan evaluasi Dinas.
- 3) Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan dengan kelompok WCP, penyampaian pesan-pesan program WCP melalui pamflet, brosur

³⁹ Bab III Pasal 3 Poin a sampai dengan l.

dan bulletin, pelaksanaan *zero waste event*, dan pelaksanaan event tahunan WCP.

c. Tahap Pembinaan⁴⁰

- 1) Pembinaan dilakukan oleh Dinas terhadap *cleaning leader* minimal dua bulan sekali.
- 2) Materi pembinaan yang diberikan berupa tata kerja *cleaning leader*, pemilahan sampah, pengangkutan sampah, dan pengelolaan Sentra Produksi.

d. Tahap Akhir Proses Pengolahan Sampah⁴¹

- 1) Sampah Residu diangkut secara berkala oleh Petugas Dinas diproses langsung di TPA.
- 2) Sampah Organik diangkut secara berkala oleh *cleaning leader* untuk diproses di Sentra Produksi Taman Gampong.
- 3) Sampah botol, kemasan dan sampah lainnya yang bernilai ekonomis diangkut secara berkala oleh pihak yang ditunjuk oleh Dinas untuk diproses pada tempat pengolahan sampah yang ditetapkan oleh Dinas.

3. WCP dalam Konsep Keberlanjutan

Berbicara mengenai konsep keberlanjutan yang merupakan salah satu aspek penting dalam suatu kegiatan pemberdayaan khususnya ekonomi sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya berarti berbicara mengenai sistem manajemen atau sistem pengolahan yang memadai, tepat sasaran dan bernilai guna. Dengan kata lain dapat dipahami bahwa konsep keberlanjutan atau kontinuitas (*sustainable*) baru akan atau baru bisa untuk dipahami dan dijalankan atau dapat berjalan jika

⁴⁰ Bab III Pasal 5 ayat (1) sampai dengan (3) untuk sosialisasi dan Pasal 6 ayat (1) dan (2) untuk pembinaan.

⁴¹ Bab III Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (3).

terdapatnya atau memadainya sistem pengolahan yang sesuai dengan aspek atau bagian atau objek dari bahan tersebut.

Pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan terintegrasi atau ISWM/ *Integrated Sustainable Waste Management* fokus pada pengelolaan sampah sebagai multi aktor, kesepakatan multi lapisan sistem sosial teknik (Ijgosse, Anschütz and Scheinberg 2004; Spaargaren and van Vliet 2000 dalam Scheinberg 2010: 9). ISWM meletakkan sektor formal dan bisnis informal pada keseluruhan sistem sosial teknis pada pengelolaan sampah. Kerangka ISWM seperti pada gambar 1 di bawah mengenali tiga dimensi utama pada pengelolaan sampah yaitu stakeholder, elemen sistem sampah dan aspek keberlanjutan (Scheinberg, 2010: 9).⁴²

⁴² Rizqi Puteri Mahyudin, Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan, dalam *Jurnal EnviroScientiae Universitas Lambung Mangkurat*, 2014. Diakses dari <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/es/article/view/1962/1709>, pada Agustus 2020, pukul 22.00 WIB.



Gambar 1. Kerangka pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan terintegrasi atau ISWM (Integrated Sustainable Waste Management) Sumber: Ijgosse, Anshutz dan Scheinberg, 2004 dalam Scheinberg (2010: 9).

Keterangan:

NGOs: Non Governmental Organizations

CBOs: Community Based Organizations

Aspek Keberlanjutan (*Sustainable*) dari Program WCP sebenarnya sudah pemerintah coba penuhi melalui aturan – aturan khususnya jika di lokasi penelitian penulis di Kota Banda Aceh yaitu melalui konsep monitoring dan evaluasi dan pembiayaan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dari Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengelolaan Sampah berbasis Masyarakat dengan Sistem Waste Collecting Point, yang berbunyi:

- Pasal 8 berbunyi: (1) Pembiayaan Pengelolaan sampah dengan sistem WCP bersifat sharing dana yang bertujuan untuk mewujudkan keberlanjutan pelaksanaan pengelolaan sampah menuju Gampong Mandiri.
- (2) Gampong Melalui APBG dapat membiayai honor/insentif pengelola WCP, tong sampah,

peralatan gotong royong dan keperluan sentra produksi.

- (3) Dinas dapat menganggarkan dana dalam bentuk hibah perlengkapan/peralatan pemilah/pengolah sampah, kegiatan sosialisasi dan pembinaan.

Pasal 9 berbunyi: (1) Memonitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Peninjauan lapangan secara rutin untuk memonitoring kebersihan gampong secara keseluruhan dan kondisi titik – titik WCP; dan
 - b. Menerima masukan dari *cleaning leader* untuk perbaikan mekanisme pelaksanaan di lapangan.

Berdasarkan dua pasal diatas maka dapat dipahami bahwa keberlanjutan dari program WCP sudah memiliki konsep kerjanya melalui pembiayaan dan Monev yang seyogyanya dengan adanya dua hal tersebut maka seharusnya pihak pemerintah khususnya Pemerintah Kota Banda Aceh berarti pihak pemerintah memiliki laporan dengan jangkauan waktu tertentu yang berisi efektifitas dari program WCP tersebut.

4. Perkembangan dan Model WCP di Banda Aceh

Untuk mengurangi jumlah sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh tahun 2016 berupaya menjalankan sistem pengelolaan sampah *Waste Collecting Point* (WCP). Sampah yang bersumber dari rumah warga dipilah terlebih dahulu sebelum dibuang ke titik tempat sampah yang telah ditentukan. Jenis sampah yang dipilah yaitu sampah botol; sampah kemasan; sampah organik dan; sampah residu.

Pihak Pemerintah Banda Aceh melalui DLHK3 dan melalui media program WCP ini menerapkan konsep tentang pengolahannya yaitu sampah yang dapat di daur ulang (sampah botol dan kemasan) dimasukkan ke rumah produksi untuk dibuat menjadi kerajinan tangan. Selanjutnya, sampah organik dikirimkan ke rumah produksi pupuk kompos. Hanya sampah residu yang tidak dapat didaur ulang dibuang ke titik-titik yang telah ditentukan. Sampah residu nantinya diangkut oleh tim kebersihan DLHK3 Kota Banda Aceh. Penggunaan sistem WCP ini dapat membantu pemerintah untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Sistem WCP dapat mengurangi 25% jumlah sampah yang diangkut ke TPA. Karena masyarakat telah terbina untuk memilah sampah. Sampah yang diangkut Tim Kebersihan DLHK3 Kota Banda Aceh hanya sampah residu saja.

Untuk menciptakan kelancaran kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pemindahan sampah desa, maka dibentuk struktural organisasi sebagai berikut: Pengawas; *cleaning leader*; Ketua WCP Dusun, Pengelola WCP dan; anggota WCP. Pihak DLHK3 hanya bertugas sebagai pengawas dan mengadakan sosialisasi kepada *cleaning leader*, selanjutnya biaya insentif untuk ketua WCP dusun, pengelola WCP dan pembelian tong sampah ditanggung oleh desa bersangkutan. Penggunaan anggaran desa untuk kegiatan ekonomi produktif dan pelestarian lingkungan telah dicantumkan dalam Perwal Kota Banda Aceh.

Perwal Kota Banda Aceh No. 77 Tahun 2016 berisikan tentang pengalokasian dana desa anggaran 2017 untuk memberdayakan masyarakat desa dan melestarikan lingkungan. Terdapat juga pada Perwal Kota Banda aceh No. 88 Tahun 2016 bahwa pengalokasian Anggaran Dana Gampng (ADG) untuk pembangunan melalui kegiatan usaha ekonomi produktif dan pelestarian lingkungan. Walikota Banda aceh juga sudah mengirimkan surat edaran yang berisikan tentang Alokasi Dana Kebersihan dan Pelestarian. Untuk itu pelaksanaan sistem pemilahan

sampah WCP ini dapat membantu setiap desa untuk menggunakan anggaran desa sesuai dengan Perwal Kota Banda Aceh.

Tim DLHK3 Kota Banda Aceh telah melakukan observasi ke wilayah pesisir Kota Banda Aceh. Sampah banyak berserakan di laut, pesisir pantai, selokan dan pinggir jalan. Sistem WCP akan dijalankan pada kawasan pesisir pantai tahun 2017 ini. Telah terpilih dua desa untuk melaksanakan sistem WCP, yaitu Desa Deah Glumpang dan Desa Deah Teungoh Kecamatan Meuraksa, Kota Banda Aceh.

Pihak DLHK3 perlu mengadakan MoU untuk kejelasan kegiatan WCP ini. Kerjasama kedua belah pihak membutuhkan suatu manajemen untuk menghasilkan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan. Penandatanganan MoU dengan Desa Deah Glumpang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2017 di Masjid Desa Deah Glumpang. Penandatanganan MoU dengan Desa Alue Deah Teungoh dilaksanakan tanggal 1 Juni 2017 di Masjid Ayudhya Alue Deah Teungoh. Kegiatan penandatanganan MoU tersebut dihadiri oleh Keuchik Gampong, Sekretaris Gampong, Tuha Peut, dan warga.⁴³

⁴³ Informasi data sekunder yang didapatkan melalui web melalui : <http://dlhk3.bandaacehkota.go.id/2017/07/13/wcp-untuk-banda-aceh-bebas-sampah-2025/> Diakses pada Desember 2020, pada pukul 22.00 WIB.



Gambar 2. Alur Sampah Sistem Waste Collecting Point (WCP)

Sumber: Dokumen DLHK3 Kota Banda Aceh

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Grounded Reseach*) yang bersifat kualitatif. *Grounded theory* merupakan suatu metode riset yang berupaya untuk mengembangkan teori tersembunyi di balik data dimana data ini dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis (Martin dan Turner, 1986).⁴²

Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan, metode untuk menemukan secara spesifik tentang apa yang sedang terjadi di tengah – tengah kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian. Maka pada prinsipnya penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat atau setidaknya menjawab pertanyaan – pertanyaan yang bersifat praktis di dalam masyarakat.

B. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian ini, penulis berperan sebagai pengamat partisipan lebih tepatnya mengamati dan melakukan beberapa pengumpulan data di tengah – tengah partisipan yang dalam hal ini partisipan yang dimaksud adalah masyarakat yang terlibat langsung dengan kegiatan WCP yang diteliti. Penulis memilih untuk berperan sebagai pengamat partisipan dikarenakan penulis berusaha untuk dapat mengumpulkan data secara lebih valid dan menyeluruh terkait dari rumusan masalah yang ditanyakan di atas sebelumnya oleh karena itu sosok penulis diketahui serta diterima dan disambut dengan baik oleh partisipan terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis. Waktu penelitian berlangsung dari tanggal 15 Agustus 2020 – 15 September 2020.

⁴² I Gusti Ayu Nyoman Budiasih, *Metode Grounded Theory Dalam Riset Kualitatif, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 9 No. 1, Januari 2014, hlm. 21.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian disini adalah sumber-sumber yang bisa dijadikan sebagai keterangan atau yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.⁴³ Oleh karena itu variabel – variabel yang ditentukan oleh penulis disini dilakukan dengan pemilahan secara sengaja dan bertujuan. Yakni dengan mengkategorikan sesuai atau setidaknya mewakili karakteristik yang akan diteliti yang juga dilakukan dengan berbagai pertimbangan.⁴⁴

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan tujuan untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan dalam rumusan masalah sebelumnya yaitu untuk mengetahui bentuk pemberdayaan ekonomi melalui program *Waste Collecting Point* di Gampong Alue Deah Teungoh dan bentuk peningkatan kesejahteraan ekonomi perempuan dalam hal pemberdayaan perempuan di gampong tersebut.

1. Teknik Observasi

Observasi dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya baik melalui hasil kerja panca indra mata maupun dengan panca indra lainnya.⁴⁵ Sedangkan Teknik observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis dan terstruktur terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian yang diteliti, pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa.⁴⁶

⁴³ Sugiono, *Metode Penelitian Tindakan Kelas Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm., 15-16.

⁴⁴ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm., 67.

⁴⁵ Bogong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm., 53.

⁴⁶ Nurul Zaria, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm., 173

Dalam penelitian ini teknik observasi yang dilakukan penulis agar dapat mengamati bentuk partisipasi masyarakat Gampong Alue Deah Teungoh dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan.

2. Teknik Wawancara

Wawancara dapat dipahami sebagai kegiatan percakapan antara dua pihak yaitu pihak penanya dan pihak pemberi informasi atau yang ditanyai dengan berbagai tujuan tertentu. Dan wawancara atau *interview* yang dilakukan di sini dilakukan secara tatap muka, penulis menanyakan beberapa pertanyaan secara lisan dan juga dijawab secara lisan sebagai sumber data yang dicari. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yaitu 1 orang Keuchik Gampong Alue Deah Teungoh, 1 orang *cleaning leader*,

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu metode pengumpulan data yang di peroleh melalui bahan-bahan yang ada dalam bentuk dokumen, gambar, berita dan lain sebagainya yang relevan dengan masalah yang penunlis teliti. Dokumentasi yang penulis maksudkan disini ialah berupa pengumpulan bahan – bahan bacaan baik buku, jurnal, artikel ilmiah, berita media dan laporan-laporan yang tertulis dan terkait serta gambar – gambar di lokasi yang diteliti secara empirik.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif ialah sebuah teknik analisa data yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data – data yang telah dikumpulkan sebelumnya, kemudian penulis memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum hingga keadaan empirik atau keadaan yang sebenar – benarnya terjadi dan teknik ini bertujuan memberikan

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta kemudian akan dikemas dengan penelitian yang bersifat terstruktur sehingga dapat memberikan jawaban dari hipotesa yang penulis sampaikan sebelumnya.⁴⁷

Adapun data awal yang telah penulis kumpulkan adalah berupa beberapa wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa pihak yang berkaitan langsung dengan kegiatan WCP terkhususnya adalah kaum perempuan dan juga kondisi lapangan WCP yang bisa penulis datangi. Di dalam gampong tersebut kurang lebih terdapat 10 buah WCP yang terbagi ke dalam empat dusun. Penulis melakukan beberapa wawancara dengan sebagian pihak guna mendapatkan beberapa gambaran umum terlebih dahulu yang kemudian akan dikembangkan yang tentunya masih ada beberapa kemungkinan bahwa penulis akan melakukan pengumpulan data selanjutnya di lapangan apa bila diperlukan.

Tabel 1.
Informan yang Diwawancarai

No	Informasi yang Ingin Diperoleh	Informasi/Keterangan		
		Kedudukan	Nama Informan	Tgl. Wawancara
1	Profil Gampong dan Kebijakan Gampong Terkait Kegiatan WCP	Pembina (WCP), Keuchik Gampong Alue Deah Tengoh	Azri Munaldi, SE.	Selasa, 25 Agustus 2020
2	Kondisi dan Perkembangan Kegiatan WCP dan Keikutsertaan Kaum	Cleaning Leader	Hayatun Nufus	Selasa, 18 Agustus 2020

⁴⁷ Lexy.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009, hlm, 287.

	Perempuan			
3	Bentuk – bentuk Pengembangan Kegiatan WCP	Ketua WCP 10	Rafnila	Jumat, 14 Agustus 2020
4	Pemanfaatan Pengembangan serta Keberlanjutan Kegiatan WCP	Ketua WCP 6	Rawani Harahap	Rabu, 19 Agustus 2020
5	Peningkatan Kualitas Ekonomi Perempuan melalui WCP	Ketua WCP 2	Siti Rukyah	Kamis, 20 Agustus 2020
6	Antusias Masyarakat dan Efektifitas Program WCP	Ketua WCP 1	Mariani	Kamis, 20 Agustus 2020

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan atau kevalidan pada penelitian ini diusahakan penulis melalui beberapa cara yaitu dengan meninjau langsung data yang akan dicari di tengah – tengah masyarakat Gampong Alue Deah Teungoh sebagai partisipan dalam penelitian ini khususnya yang terlibat dan menjalankan langsung kegiatan *Wasting Collecting Point* ini oleh penulis sendiri. kemudian setelah didapatkan data berupa hasil wawancara, gambaran langsung keadaan dari WCP, hingga ke reaksi masyarakat terhadap kegiatan penelitian ini, penulis melanjutkannya dengan melakukan analisis mendalam terkait data – data yang didapatkan sebelumnya dan meninjaunya dengan teori – teori yang dirasa sejalan atau mendukung memberikan analisis lebih jauh terkait penelitian atau yang bersifat triangulasi (menggunakan beberapa sumber, teori, serta metode). Tidak lupa penulis juga meminta beberapa gambaran pendapat terkait acuan penelitian kepada beberapa dosen yang mengampu dan beberapa teman sejawat terkait keabsahan data yang penulis kumpulkan.

G. Tahapan Penelitian

Adapun pada tahapan yang dilakukan penulis pada penelitian ini secara umum terdiri dari tiga tahapan yaitu penelitian pendahuluan yang memuat penyusunan dan perumusan hipotesa awal terkait rancangan penelitian yang akan dilakukan, pengambilan data awal melalui observasi, peninjauan penelitian – penelitian terdahulu, hingga perumusan masalah penelitian dengan merujuk ketersediaan teori – teori yang mendukung.

Lalu dilanjutkan dengan pengembangan desain penelitian yang memuat pengkajian data awal yang telah dikumpulkan sebelumnya di lapangan dengan dosen pengampu atau pembimbing yang oleh karena itu penulis mendapatkan perumusan yang lebih terstruktur. Walaupun pada hakikatnya pengembangan penelitian yang penulis lakukan telah penulis coba kembangkan melalui tahap awal sebagian sebelumnya.

Kemudian penelitian dilanjutkan dengan penulisan draft penelitian tahap akhir dengan merujuk kepada hasil pengembangan pada tahap sebelumnya. Penulisan yang dilakukan merujuk kepada arahan dari pada dosen pembimbing dan buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dalam penulisan ini juga jika dirasa perlu penulis mengumpulkan kembali beberapa data lapangan yang diperlukan dan dirasa kurang sebelumnya agar analisis yang didapatkan nantinya menjadi lebih dekat dengan hakikat ilmu yang dicari. Lalu ditutup dengan penyempurnaan penulisan yang penyusunan ke dalam penelitian skripsi.

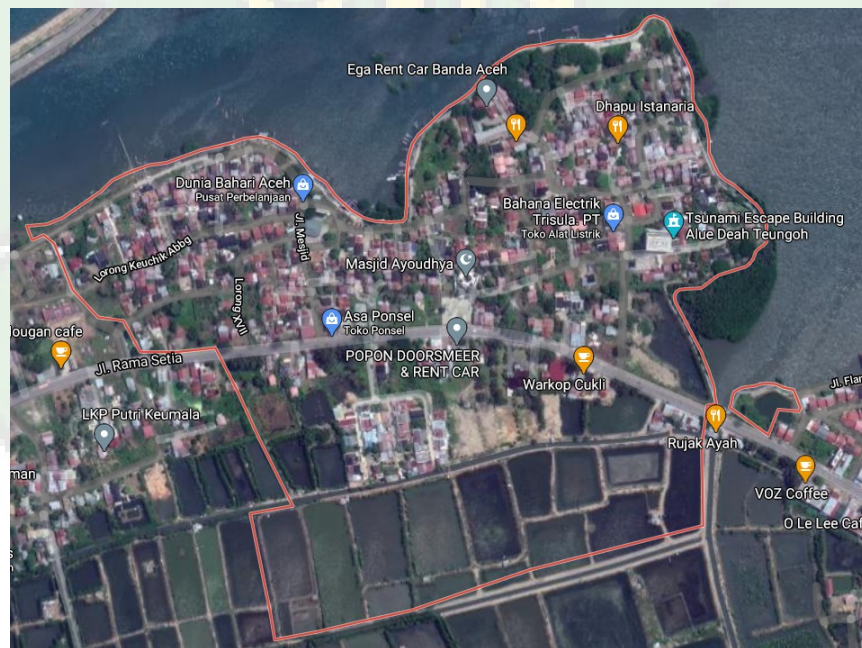
BAB IV PENYAJIAN DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Profil Umum Objek Penelitian

1. Letak Geografis

Gampong Alue Deah Teungoh tergolong daerah pesisir yang sebelah utara berbatasan langsung dengan laut Ulee Lheue, sebelah selatan berbatasan dengan area pertambakan yang terdiri dari tambak ikan dan tambak udang. Sebelah barat berbatasan dengan area wisata dan kuliner milik swasta yang berada pada Jalan Rama Setia. Sedangkan sebelah timur berbatasan dengan jembatan dan alur *Tsunami Escape Building*.

Letak geografis dari Gampong Alue Deah Teungoh berada pada titik $05^{\circ}33'59.2''$ LU, $095^{\circ}18'10.3''$ BT.⁴⁸ Adapun tampilan satelit dari Gampong Alue Deah Teungoh adalah sebagai berikut:



Gambar 3: Gampong Alue Deah Teungoh Tampilan Satelit⁴⁹

⁴⁸ Fauzi Arja, dkk, "Growth Patterns *Crassostrea sp* in Various Cultural Media of Marine Water Area, Banda Aceh". *ES3 Web of Conferences Journal*, Vol. 151, Februari 2020, hlm. 1. Dapat diakses pada 20 Desember 2020, pukul 22.00 WIB https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/11/e3sconf_icvaes2020_01032/e3sconf_icvaes2020_01032.html

⁴⁹ Google earth, Diakses pada 20 Desember 2020, pada pukul 22.00 WIB. Melalui: <https://earth.google.com/web/search/alue+deah+tengoh/@5.55020696,95.26904128,->

2. Sejarah Singkat Gampong dan Struktur Organisasi Gampong

Alue Deah Teungoh adalah salah satu Gampong (sebutan untuk kampung) yang berada di pesisir Kota Banda Aceh, Indonesia. Gampong ini dipimpin oleh Keuchik (sebutan untuk kepala desa) Azri Munaldi yang baru saja dilantik pada 4 Februari 2020 lalu.⁵⁰ Gampong Alue Deah Teungoh memiliki 4 (empat) dusun dengan luas sebesar 62.5 Ha. Jumlah total penduduk yang bermukim di gampong ini sebanyak 1.410 jiwa dengan pembagian 726 orang laki-laki dan 684 orang perempuan. Sedangkan jumlah perempuan yang bekerja sebagai ibu rumah tangga sebanyak 300 orang dan yang mengikuti kegiatan WCP ini lebih kurang sekitar 150 orang.⁵¹

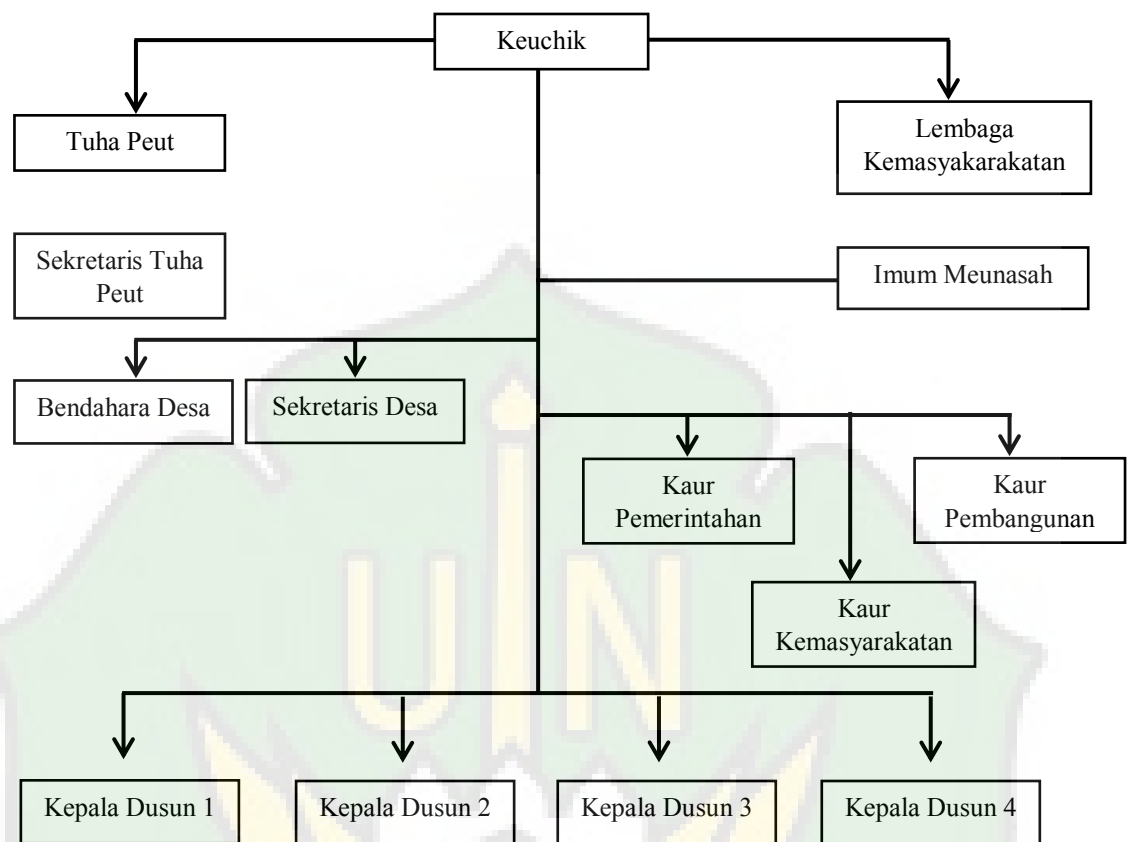
Gampong Alue Deah Teungoh merupakan gampong yang digadangkan oleh Walikota dalam memproduksi dendeng ikan. Selain itu terdapat banyak olahan lain yang diproduksi di Gampong Alue Deah Teungoh ini. Sebagaimana yang penulis paparkan pada pendahuluan penelitian, bahwa gampong ini awalnya menjadi gampong percontohan untuk kegiatan WCP.

Adapun struktur pemerintahan Gampong Alue Deah Teungoh ialah sama dengan struktur gampong pada umumnya khususnya di kawasan Aceh. Untuk lebih jelasnya dapat dipahami pada bagan berikut:

0.18874797a,590.56161598d,35y,153.27790598h,44.99707252t,0r/data=CnsaURJLCiUweDMwNDAzMGNmZDFjZDEyZGI6MHgxN2FmNmNmFIYtIjODI0GSm65G7GPxZAIcpms48601dAKhBhbHVlIGRIYWggdGVuZ29oGAEGASImCiQJM-eBdJWcM0ARMOeBdJWcM8AZtPuB-
oaaC0AhhMNn-SVWMA

⁵⁰ <https://bandaacehkota.go.id/berita/20458/wali-kota-keuchik-alue-deah-teungoh-wujudkan-visi-misi-gampong.html> diakses pada 12 Desember 2020.

⁵¹ Data Sekunder Penelitian, 2020. Melalui Wawancara dengan Keuchik Azri Munaldi November 2020



Bagan 1. Struktur Organisasi Gampong Alue Deah Teungoh⁵²

B. Profil WCP di Gampong Alue Deah Teungoh

1. Sejarah WCP

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang diperoleh penulis bersama Ibu Hayatun Nufus selaku Cleaning Leader di kediaman beliau yang terletak di Gampong Alue Deah Teungoh, beliau memaparkan bahwa awal terbentuknya program WCP di Gampong Alue Deah Teungoh. Program ini dibawa oleh dinas sebagai *pilot project* DLHK3 Kota Banda Aceh. WCP dimulai pada bulan Agustus tahun 2015. WCP merupakan program yang di adopsi dari Negara Jepang dalam melakukan pengolahan sampah berbasis *Waste Collecting Point* yaitu pengumpulan dan pengolahan sampah pada sumber atau satu titik sampah yang dilakukan

⁵² Hasil Wawancara dengan Azri Munaldi, Keuchik Gampong Alue Deah Tengoh, pada Tanggal 20 Agustus 2020

secara mandiri oleh masyarakat. Alasan DLHK3 membuat program WCP karena adanya kesulitan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengendalikan sampah yang membludak di TPA Gampong Jawa dan kesulitan melakukan pendekatan dengan masyarakat, terutama bagi mereka yang membuang sampah tidak pada tempatnya. DLHK3 dan Pemerintah Jepang melakukan kerjasama dalam hal pengelolaan sampah, sehingga DLHK3 Kota Banda Aceh mengutuskan salah satu staf yang bernama Ibu Yusrida untuk diberangkat ke Jepang pada tahun 2015. Seperti yang diketahui Jepang merupakan negara maju dengan sistem pengelolaan sampah terbaik. Beliau mempelajari bagaimana proses pengelolaan dan pemilahan sampah di Jepang.

Melalui penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Itawarni dengan judul “Strategi Komunikasi Edukasi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh (Studi Penerapan Program *Waste Collecting Point* di Gampong Alue Deah Teungoh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh)” dikutip dari hasil wawancara bersama ibu Yusrida terkait penyebab dibentuknya program ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Yusrida, sebagai berikut:

“Faktor utama terbentuknya program WCP ini karena pemerintah merasa kesulitan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk program 3R *Reduce* (mengurangi sampah), *Reuse* (menggunakan kembali) dan *Recycle* (daur ulang) bagaimana sampah itu bisa dikurangi. Tapi karena kita sudah ada program kerja sama ke Jepang sehingga ini menjadi salah satu pendekatan yang efektif untuk bagaimana mengurangi sampah dari sumbernya.”⁵³

Berdasarkan informasi yang dikutip tujuan Pemerintah Kota Banda Aceh saat ini menerapkan sistem 3R oleh DLHK3 Kota Banda Aceh karena masih minimnya pengetahuan masyarakat Kota Banda Aceh

⁵³ Itawarni, *Strategi Komunikasi Edukasi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh (Studi Penerapan Program Waste Collecting Point di Gampong Alue Deah Teungoh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh)*, Skripsi Mahasiswi Fak. Dakwah dan Komunikasi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2019.

terhadap pengolahan sampah. Sehingga perlu adanya pendekatan dari DLHK3 untuk mengurangi sampah yang membludak di Kota Banda Aceh.

Pada saat kembali dari Jepang, beliau membawa program tersebut dan melihat kondisi Gampong Alue Deah Teungoh yang dipenuhi tumpukan sampah serta masih banyak tumpukan sampah dan masih banyak juga masyarakat yang masih menganggap membakar sampah dapat mengurangi jumlah sampah di sekitar perumahan mereka. Hal ini sebagaimana di ungkapkan oleh Ibu Hayatun Nufus sebagai berikut:

“Pada dasarnya kita mengikuti tradisi untuk membakar sampah pada saat menyapu, mengumpulkan sampah di depan rumah terus bakar. Umumnya saat ini yang terjadi di Aceh seperti itu. Saya sendiri sebelum ada program WCP saya masih membakar sampah, Namun setelah ada program tersebut, saya mulai membiasakan untuk tidak membakar sampah”⁵⁴

Dari ungkapan di atas terlihat bahwa masyarakat Aceh pada umumnya masih membakar sampah sebagai bentuk pengurangan sampah. Membakar sampah dianggap sebagai cara yang praktis untuk menghilangkan sampah yang menumpuk. Namun, kebiasaan ini justru bisa memberikan dampak buruk bagi bumi dan kesehatan tubuh. Membakar sampah akan menghasilkan bahan-bahan kimia berbahaya. Bahan kimia ini berpotensi membahayakan kesehatan, khususnya bagi saluran pernapasan seperti sesak nafas. Tidak hanya itu, karbon dioksida ternyata juga berkontribusi dalam meningkatkan jumlah gas rumah kaca sebesar lima persen. Efek rumah kaca merupakan salah satu faktor yang memperburuk pemanasan global. Hal ini sebagaimana di ungkapkan oleh Ibu Hayatun Nufus sebagai berikut:

“Sebelum ada WCP kegiatan kebersihan lebih banyak melibatkan bapak-bapak seperti kegiatan gotong royong terus mereka langsung membakar sampah tersebut. Tapi di program WCP sendiri tidak dibenarkan membakar sampah, kami juga mengarahkan kepada masyarakat yang masih membakar sampah untuk tidak membakar sampah lagi.”

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Nufus, Cleaning Leader Gampong Alue Deah Teungoh, pada Tanggal 21 Agustus 2020

Melihat kondisi tersebut beliau berinisiatif untuk untuk menjadikan Gampong Alue Deah Teungoh sebagai desa percontohan. Setelah itu Ibu Yusrida mulai memasuki Gampong Alue Deah Teungoh. Kegiatan sosialisasi awalnya hanya *pilot project* sebagai desa percontohan, Yusrida mengumpulkan masyarakat Gampong Alue Deah Teungoh. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Hayatun Nufus sebagai berikut:

“Awal mulanya membuat kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) ramai sekali orang yang datang, lalu diberikan kue dan segala macam. Setelah FGD itu tidak ada lagi orang yang mau mengikutinya, hanya tersisa beberapa orang yang hanya memiliki keinginan saja. Tetapi kegiatan itu tetap berjalan. Akhirnya dari satu WCP pertama saya yang pegang, tidak ada uang intensif, tidak ada diberikan apapun. Saya melakukan ini dengan sukarela. setelah mengikuti pelatihan oleh Ibu Yusrida dari DLHK3 cuma saya sendiri yang buat, gak ada yang mau yang lainnya.”⁵⁵

Setelah melakukan FGD mendapatkan hasil bahwa permasalahan yang kerap muncul pada Gampong Alue Deah Teungoh. Seperti yang diketahui bahwa letak geografis Gampong Alue Deah Teungoh terletak di kawasan pesisir. Sebelum adanya WCP sampah-sampah tersebut ada yang membuang ke laut, dan dipinggir-pinggir laut sampai sampah itu sudah menumpuk tinggi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Hayatun Nufus sebagai berikut:

“Saat ini kendala di Gampong Alue Deah Teungoh yaitu penutupan selokan. Disaat angin mulai kencang sampah-sampah dari daerah lain masuk ke selokan, jadi kesannya tampak seperti berserakan sampah tersebut. Disini tidak semua selokan ada tutupnya, seandainya semua parit ada tutupnya sepeertinya sampah di parit sudah tidak ada lagi. Saat ini sedang musim angin kencang, mengumpul semua kemari. Rumah saya ini termasuk agak rendah, sampah berserakan disini”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Hayatun Nufus bahwa awalnya para peneliti dari Jepang melakukan riset di Banda Aceh terkait

⁵⁵ Hasil Wawancara denga Nufus, Cleaning Leader Gampong Alue Deah Teungoh, pada Tanggal 21 Agustus 2020

⁵⁶ Ibid.,h.53

dengan apa saja yang membuat orang Aceh cepat membangun kembali. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Jepang mengalami nasib yang sama dengan Banda Aceh yaitu dilanda bencana Tsunami. Di Aceh sendiri hilangnya rasa trauma setelah Tsunami itu dikarenakan masyarakat Aceh masih percaya bahwa semua ini adalah teguran dari Maha Pencipta dan segera bangun dari keterpurukan. Menurut masyarakat Jepang sendiri sampai saat ini masih dibayangi dengan trauma akibat bencana Tsunami, seperti yang diketahui bahwa masih ada masyarakat Jepang yang tidak percaya akan adanya sang pencipta, dan ini menjadi bukti bahwa keimanan yang menguatkan seseorang dari keterpurukan.

Melalui kerjasama tersebut, pihak dari negara Jepang melakukan pelatihan yang berlokasi di belakang bangunan *Escape Building* Gampong Alue Deah Teungoh. Ada 3 program yang diberikan yaitu *field gardening*, pengembangan kualitas nelayan, pengolahan sampah melalui program WCP dan *steaching* (strinin). Awalnya hanya *field gardening* yang diajarkan yaitu bagaimana cara menanam sayuran, dan memanfaatkan lahan-lahan kosong dijadikan untuk penanaman sayur, terutama dapat membantu masyarakat setempat, tidak harus membeli ke pasar. Seiring berjalannya waktu *field gardening* sekaligus berjalan juga pemilahan sampah melalui program WCP dengan menggunakan sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

Seiring berjalannya waktu WCP terus bertambah 2 sampai dengan 3 WCP, pertengahan tahun 2018 sampai dengan sekarang ketua WCP sudah mendapat uang intensif dari gampong dan dari dana ADG. Satu gampong diberikan dana khusus untuk pengelolaan sampah. Pada awal 2018 terdapat perjanjian antara gampong dan pemerintah Kota Banda Aceh yaitu penandatanganan (perjanjian Mou) dengan gampong. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Hayatun Nufus sebagai berikut:

“Dengan proses perizinan dari aparat gampong juga program WCP berdiri, jika tidak ada izin maka tidak bisa dilakukan

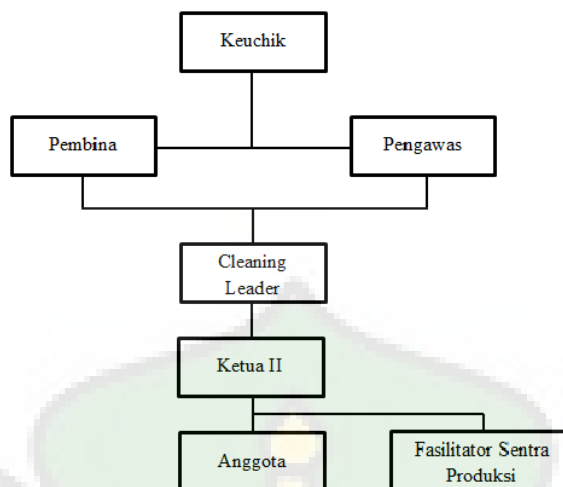
program tersebut, walaupun itu dari pihak dinas. Sekarang program itu sudah mensosialisasi program WCP sekitar 16 Gampong di Banda Aceh, Untuk Gampong Alue Deah Teungoh memiliki 10 dari 9 WCP yang aktif”⁵⁷

Seiring waktu WCP sudah mulai berkembang, sekarang sudah 16 gampong yang menerapkan *Waste Collecting Point* seperti di Gampong Alue Deah Glumpang, Gampong Alue Deah Teungoh, Gampong Setui, Gampong Pango Raya, Gampong illie, Gampong Peurada, Gampong Surien, Gampong Pie, Gampong Penjeurat, Gampong Lam Ara, Gampong Lambaro Skep, Gampong Lambung, Gampong Kota Baru, dan Gampong Lam Jamee, Komplek BPTP, Kota Banda Aceh, dan Sebagian Aceh Besar.

2. Struktur Organisasi WCP

Adapun dengan Struktur Keorganisasian dari kegiatan WCP atau dalam hal ini lebih dikenal dengan istilah Struktur Pengelola WCP. Pengelola WCP dibentuk oleh Keuchik. Yang mana Struktur dan tugas secara teorikal telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, dapat lebih mudah dipahami melalui bagan yaitu sebagai berikut:

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Hayatun Nufus, Cleaning Leader Gampong Alue Deah Teungoh, pada Tanggal 21 Agustus 2021



Bagan 2. Struktur Organisasi WCP⁵⁸

Pada bagan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah dengan sistem WCP yang diatur dalam Perwali No. 7 Tahun 2017 tentang pembentukan struktur tim pengelola WCP dan Pembentukan Kelompok Sentra Produksi. Dimana pada bagan tersebut terdapat tugas atau tanggung jawab masing-masing melalui kegiatan WCP. Pada setiap WCP terdapat ketua yang memimpin dan mengarahkan para anggota WCP dalam pelaksanaan kegiatan WCP.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis temukan sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Rawani Harahap sebagai berikut:

“Untuk pemilihan ketua WCP tidak ada syarat khusus, hanya orang yang siap bersedia dan sukarela menjadi ketua WCP. Ada sebagian yang sudah mundur dari ketua dikarenakan mereka masih berpatok ke uang, saya sebagai ketua WCP 6 wajib mendaftarkan semua rumah untuk menjadi anggota WCP. Mengikuti arahan keuchik dan *Cleaning Leader*.”⁵⁹

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Azri Munaldi, Keuchik Gampong Alue Deah Tengoh, pada Tanggal 20 Agustus 2020

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Rawani Harahap, Ketua WCP 10 Gampong Alue Deah Teungoh, pada Tanggal 20 Agustus 2020

Melihat kondisi tersebut, bahwa tidak semuanya masyarakat yang mau ikut berpartisipasi, seperti halnya dalam hal pemilihan ketua WCP yang disebutkan diatas. Kendala Gampong Alue Deah Teungoh yaitu masih sulit untuk membangun dan mengubah mindset orang disini dalam hal partisipasi. Hal ini juga disebutkan oleh Pak Azri Munaldi selaku Keuchik Gampong Alue Deah Teungoh sebagai berikut:

“Dari awal kegiatan WCP agak sulit, namun setelah dijalankan ternyata bermanfaat, saat ini sudah tersedia 10 pos WCP (kelompok ibu-ibu yang memilah sampah) sudah ada kemauan. Pada tahun 2015 sampai dengan sekarang tetap berjalan dengan lancar. InsyaAllah kita akan menambahkan pos WCP kedepannya. Sehingga bisa menjaga kebersihan lingkungan.”⁶⁰

Berdasarkan hasil pengamatan penulis kendala tersebut bahwa seiring waktu dapat berubah, karena adanya penambahan di setiap tahun, anggota WCP pun bertambah dan semakin bertambah juga kesadaran perempuan di Gampong Alue Deah Tengoh.

C. Bentuk Pemberdayaan Ekonomi Perempuan melalui WCP

Berdasarkan hasil analisis yang dikumpulkan penulis melalui observasi dan wawancara. Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, pemberdayaan ekonomi perempuan harus haruslah mengandung beberapa aspek penting yang mana jika aspek tersebut tidak terpenuhi maka kegiatan yang dilakukan tersebut bukanlah termasuk ke dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan. Aspek tersebut ialah membangun daya, dengan mendorong, memotivasi hingga membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang ada serta adanya upaya mengembangkan ke arah yang lebih baik.

Kemudian perlu dipahami juga bahwa pemberdayaan ekonomi berarti terjadi pergerakan ekonomi. Agar ekonomi dapat bergerak maka dibutuhkan komponen – komponen khusus yaitu sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya. Berdasarkan data yang ditemukan oleh

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Azri Munaldi, Keuchik Gampong Alue Deah Tengoh, pada Tanggal 20 Agustus 2020

penulis dilapangan maka diketahui bahwa ternyata WCP merupakan kegiatan penggerak awal untuk kegiatan – kegiatan lanjutan yang memberdayakan ekonomi khususnya kaum perempuan di gampong Alue Deah Teungoh. Kegiatan – kegiatan lanjutan yang dimaksud ialah Pembuatan pupuk kompos untuk Field Gardening, pengolahan sampah menjadi produk layak guna.

Perlu diketahui juga bahwa prinsip WCP ini sebenarnya menerapkan sistem 3R yaitu *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* yang bermakna mengurangi, menggunakan kembali dan mengolah kembali. Tujuan utama dari WCP sebagaimana yang dipaparkan pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tersebut yang merupakan upaya pemerintah dalam mengurangi penimbunan sampah kota yang kebanyakan berasal dari sampah rumah tangga dengan metode pemilahan mandiri oleh rumah tangga itu sendiri. Selain menghemat anggaran terkait pengontrolan timbunan sampah (*Reduce*), metode ini bisa menjadi prospek baru bagi masyarakat khususnya bagi sektor ekonomi suatu gampong sebab pemilahan sampah secara mandiri ini menjadikan suatu kelompok masyarakat tertentu tergerak atau berputarnya ekonomi melalui kreativitas dan pengolahan terstruktur.

Kemudian dengan dilakukan pemilahan mandiri ini maka pengguna program ini dapat menemukan beberapa barang atau sampah yang dibuang yang ternyata masih layak guna (*Reuse*) atau bernilai jual setelah melalui tahap pengolahan tertentu (*Recycle*).

Sehingga dapat dipahami bahwa WCP merupakan program pemilihan dan pemisahan sampah berdasarkan kategorinya dan yang akan digunakan untuk kegiatan lanjutan sebagaimana yang penulis sebutkan sebelumnya. Untuk memudahkan pembaca maka penulis melakukan kategorisasi terkait temuan lapangan yang penulis kumpulkan saat pengambilan sampel. Adapun kategori yang dimaksud ialah sebagai berikut:

- Pengolahan Tahap Awal;

Pengolahan tahap awal ini merupakan pengolahan yang dilakukan satuan sentra produksi, yaitu yang terdiri dari memilah, memilih dan memisahkan barang – barang atau sampah sampah antara lain:

- a. Masih bisa digunakan kembali namun masih harus masuk ke atau melalui tahap pengolahan tertentu bisa merupakan tahap memperbaiki atau penyesuaian, yang terdiri dari gelas plastik bekas air mineral, botol – botol plastik, botol – botol kaca, kardus – kardus, wadah – wadah plastik lainnya.
- b. Tidak bisa atau sulit terurai yang baru bisa dengan harus diolah terlebih dahulu menjadi barang atau produk layak guna, yang biasa terdiri dari bungkus – bungkus bekas minuman dan makanan instan, plastik wadah makanan, plastik sabun detergen, botol kaleng minuman.
- c. Sampah yang tidak bisa digunakan kembali dan diolah kembali namun masih bisa dimanfaatkan menjadi pupuk kompos seperti sampah bekas masak atau olahan dapur, rumput – rumput kering, dan sampah – sampah kandang lainnya.
- d. Sampah yang tidak bisa digunakan sama sekali yang sampah ini lah yang kemudian dilanjutkan untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) yang biasa terdiri dari selain sampah – sampah telah disebutkan di atas.

Kategori sampah dari a, b dan c tersebut kemudian dikumpulkan dan dipisahkan untuk kemudian digunakan dalam kegiatan lanjutan. Ketiga kategori sampah diatas penulis sebutkan sebagai bahan dasar.

- Pengolahan Tahap Lanjutan;

Pengolahan tahap lanjutan ini merupakan kelola lebih jauh atau lanjut dari ketiga kategori sampah yang penulis sebutkan sebagai bahan dasar. Penulis menyebutkan tahap ini sebagai tahap lanjutan karena tahapan ini baru bisa dilakukan setelah tahap awal telah selesai dilakukan atau telah mendapatkan hasil berupa Bahan Dasar tersebut. Adapun pengolahan tahap lanjutan ini yang penulis temukan dilapangan berupa:

- a. Pengolahan sampah plastik menjadi barang layak guna dan bernilai jual.
- b. Pembuatan pupuk kompos dan *field gardening*.

1. Daur Ulang Sampah Menjadi Produk Layak Guna dan Bernilai Jual

Sebagaimana yang telah jelaskan sebelumnya bahwa pengolahan sampah menjadi produk layak guna ini merupakan bagian dari pengolahan tahap lanjutan yang mana bahan dasar yang digunakan adalah seperti bekas botol minuman, plastik atau bekas bungkus makanan dan minuman instan yang memang notabeneanya susah atau bahkan tidak bisa terurai namun masih bisa digunakan atau dimanfaatkan.

Sistem pemilahan sampah di WCP seperti sisa makanan, botol, plastik, kertas, atom. Selama ini masyarakat berpikir bahwa sampah seratus persen sampah itu dibuang. Namun setelah dilakukan pemilahan yang dibuang hanya 25 persen. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Hayatun Nufus sebagai berikut:

“Semenjak adanya program WCP pelan-pelan walaupun tidak 100% yang kita mau tetapi banyak yang sudah berkurang. Saat ini ibu-ibu Gampong Alue Deah Teungoh saat mengadakan acara seperti pesta perkawinan atau kenduri jadi sisa botol-botol minuman yang sudah habis tidak dibuang lagi, dulu masih dibuang atau dibakar. Untuk sekarang kardus bekas minuman gelas. Sekarang semenjak lamanya program WCP berjalan kardus tersebut tidak dibuang lagi karena mempunyai nilai timbangan sendiri, botolnya juga dikutip. Tujuannya dari program tersebut

untuk pembatasan timbulan sampah. Saat ini masyarakat disana sudah mulai sadar akan kebersihan sampah.”⁶¹

Setiap Ketua dan anggota WCP mendapatkan kerangka pilah yang diberikan oleh pihak DLHK3 untuk memudahkan pemilahan sampah mandiri sebelum dibawa ke depo WCP terdekat. Berdasarkan observasi penulis bahwa belum semua perempuan di Gampong Alue Deah Teungoh aktif terlibat dalam kegiatan WCP ini. Mayoritas perempuan di Gampong Alue Deah Teungoh bekerja sebagai Ibu rumah tangga dan sebagian lagi bekerja, karena kesibukan tersebut, hanya perempuan-perempuan yang berminat saja yang ingin melakukan kegiatan tersebut, tidak ada paksaan untuk mengikutinya. Hal ini sebagaimana di ungkapkan oleh Ibu Rawani Harahap sebagai berikut:

“Kami sudah dibagikan kerangka pilah dari dinas DLHK3, dibagikan kepada ibu-ibu yang mau memilah sampah saja, nanti kami melakukan pengecekan, apabila ada ibu-ibu yang tidak mau memilah lagi maka akan digantikan dengan yang lain. Karena pihak dinas tidak menyediakan banyak tempat pemilahan tersebut dikarenakan sudah terdata sekian yang harus dibagikan ke masyarakat”⁶²

Dari pemanfaatan sampah itu sendiri disediakan DPO-DPO seperti kios WCP biasanya dikenal dengan bank sampah WCP. Untuk kegiatan pemilahan sampah di rumah masing-masing dilakukan setiap hari. 1 WCP terdapat 20 sampe 30 KK. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Hayatun Nufus sebagai berikut:

“Jadi ibu-ibu disana anggotanya itu dari rumah membawa sampah residu, plastik, botol, kertas, atom dan botol kaca di bawa ke WCP lalu dipilah disana. Sebenarnya pengangkutan sampah dilakukan setiap hari berhubung pengangkutan dan penimbangannya seminggu sekali, setiap hari minggu sore ibu-ibu membawa sampah. Sampah yang dibuang seperti popok bayi yang kotor-kotor saja, yang lainnya masih bisa dipergunakan lagi. Jadi hasil

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Hayatun Nufus, Cleaning Leader Gampong Alue Deah Tengoh, pada Tanggal 21 Agustus 2020

⁶² Hasil Wawancara dengan Rawani Harahap, Ketua WCP 6 Gampong Alue Deah Tengoh, pada Tanggal 20 Agustus 2020

dari timbangan tersebut dikembalikan lagi kepada ibu-ibu di WCP ini.”⁶³

Berdasarkan pengamatan dari hasil observasi penulis bahwa jenis sampah yang dapat menimbulkan bau seperti perut ikan atau kulit udang sebagian masyarakat membuang langsung laut sungai, dan sebagian lagi dikubu. Rata-rata sampah organik termasuk bangkai binatang dibuang ke laut yang akan menjadi pakan, Sehingga ikan dan udang pun bertambah banyak di Gampong Alue Deah Teungoh.

Seminggu sekali DLHK3 Kota Banda Aceh mengambil sampah yang sudah dipilah dari rumah lalu ditimbang. 3 bulan sekali dana dari hasil timbangan tersebut dicairkan, tidak ada pemotongan sama sekali. dari hasil timbangan sampah 3 bulan sekali jika dirupiahkan dimulai dari 200 – 400 ribu, bahkan pernah 1 WCP pernah mendapatkan 700 ribu. Dari hasil penimbangan 3 bulan sekali, nanti ketua dan anggota WCP mendiskusikan hasil pemilahan sampah yang sudah mereka kumpulkan ternyata ada nilai ekonominya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Hayatun Nufus sebagai berikut:

“Awalnya mereka tidak mau, namun seiring waktu berjalan dan terus adanya penambahan WCP, mereka sudah menyadari bahwa tidak semua sampah yang kita buang juga terdapat manfaat WCP dengan nilai ekonomis seperti halnya mereka membeli sendok, mangkok dan piring untuk dibagikan. Seperti membeli barang yang bisa dibagikan kepada ibu-ibu contohnya ketika mendekati bulan puasa biasanya ibu-ibu di gampong Alue Deah Tengoh membeli sirup atau membeli mangkok dari bahan keramik atau sendok. Jadi ibu-ibu yang mengikuti WCP termotivasi dengan adanya pemilahan sampah tersebut”⁶⁴

Pengelolaan yang dilakukan terhadap kegiatan WCP tersebut dari hasil pemilahan, diambil oleh DLHK3 lalu ditimbang, DLHK3 membina Ibu-ibu Gampong Alue Deah Teungoh untuk membuat kerajinan daur ulang seperti membuat dompet, tas dan kotak pensil hasil dari sampah

⁶³ Hasil Wawancara dengan Hayatun Nufus, Cleaning Leader Gampong Alue Deah Tengoh, pada Tanggal 21 Agustus 2020

⁶⁴ Ibid., hlm.62

berkemasan plastik seperti dari saset soklin, saset kopi, saset makanan dll. yang sudah digunting-gunting kecil, sudah diberdayakan kelompok daur ulang disini. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Rawani Harahap sebagai berikut:

“Semenjak adanya program WCP pelan-pelan walaupun tidak 100% yang kita mau tetapi banyak yang sudah berkurang. Saat ini ibu-ibu Gampong Alue Deah Teungoh saat mengadakan acara seperti pesta perkawinan atau kenduri jadi sisa botol-botol minuman yang disudah habis tidak dibuang lagi, dulu masih dibuang atau dibakar. Untuk sekarang kardus bekas minuman gelas. Sekarang semenjak lama nya program WCP berjalan kardus tersebut tidak dibuang lagi karena mempunyai nilai timbangan sendiri, botolnya juga dikutip. Tujuannya dari program tersebut untuk pembatasan timbulan sampah. Saat ini masyarakat disana sudah mulai sadar akan kebersihan sampah.”⁶⁵

Namun perlu diketahui bahwa di Gampong Alue Deah Teungoh ini pengolahan atau kegiatan daur ulang sebagai tindakan lanjutan dari WCP tidak memiliki acuan atau standar khusus terkait produk apa yang akan dikejar untuk dihasilkan. Hal ini terjadi karena sampah yang dihasilkan tidak pernah tetap. Dengan kata lain produk yang dihasilkan tergantung dari bahan dasar yang bisa digunakan. Dengan kata lain juga produk yang memiliki nilai jual ini tidak selalu ada, hal ini disebabkan karena tergantungnya bahan dasar yang akan diolah.

Pada tahapan ini juga penulis menemukan bahwa yang dihasilkan atau diproduksi juga bisa merupakan bahan dasar lainnya yang nantinya akan digunakan pada *field gardening*, yaitu berupa pupuk kompos dan tempat peletakan bibit semai (*seedling*).

Adapun kendala atau poin negatif dari tahap ini adalah seperti pembahasan di atas yaitu tidak adanya acuan produk apa pastinya yang akan dibuat dan tidak adanya acuan waktu pasti artinya dalam satu bulan belum ada acuan pasti berapa produk daur ulang yang akan dihasilkan.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Rawani Harahap, Ketua WCP 6 Keuchik Gampong Alue Deah Teungoh, pada Tanggal 20 Agustus 2020

Kemudian tidak adanya itu, penulis juga mendapati bahwa hanya sebagian dari ibu – ibu gampong tersebut yang tidak ikut serta bahkan acuh jika berkaitan daur ulang, berbeda dengan *field gardening*. Dengan kata lain perempuan lebih banyak tertarik kepada kegiatan lanjutan dari *field gardening*.



Gambar 4. Pemilahan sampah rumah tangga berdasarkan jenisnya di rumah salah satu anggota WCP.⁶⁶



Gambar 5. Sebelum pengolahan sampah⁶⁷

Gambar 6. Contoh Hasil Daur Ulang⁶⁸

⁶⁶ Hasil Dokumentasi di kediaman salah satu anggota WCP di Gampong Alue Deah Teungoh, pada Tanggal 21 Agustus 2020

⁶⁷ Hasil Dokumentasi di WCP 2 Gampong Alue Deah Teungoh, pada Tanggal 20 Agustus 2020

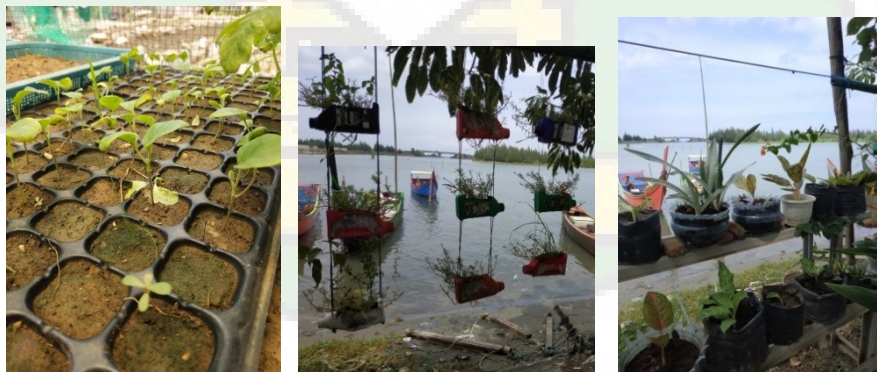
Adapun contoh lainnya dari produk daur ulang lainnya akan penulis lampirkan pada daftar lampiran.

2. Pembuatan Pupuk Kompos dan Field Gardening

Field gardening merupakan bagian dari kegiatan lanjutan dengan bahan dasar yaitu berupa pupuk kompos dan tempat wadah peletakan bibit semai. Perlu dipahami bahwa pada tahapan ini penulis menemukan bahwa terdapat setidaknya tiga komponen atau alat yang digunakan oleh pengelola yang dua diantaranya didapati penulis merupakan hasil hibah atau pemberian dari pemerintah kota Banda Aceh. ketiga alat atau komponen tersebut ialah lahan, bibit tumbuhannya dan bahan dasar.

Tahapan ini biasanya memakan banyak waktu untuk bisa dipanen hasilnya. Tergantung dari tumbuhan atau sayur apa yang ditanam oleh pihak pengelola.

- a. Dimulai dari pemilihan wadah untuk semai; yang mana wadah ini berasal dari hasil pengolahan tahap awal yang penulis sebutkan sebagai bahan dasar. Dan sebagian berasal dari hibah pemerintah dan pribadi.



Gambar 7. Wadah semai hasil daur ulang⁶⁹

⁶⁸ Hasil Dokumentasi di kediaman Hayatun Nufus Gampong Alue Deah Teungoh, pada Tanggal 20 Agustus 2020

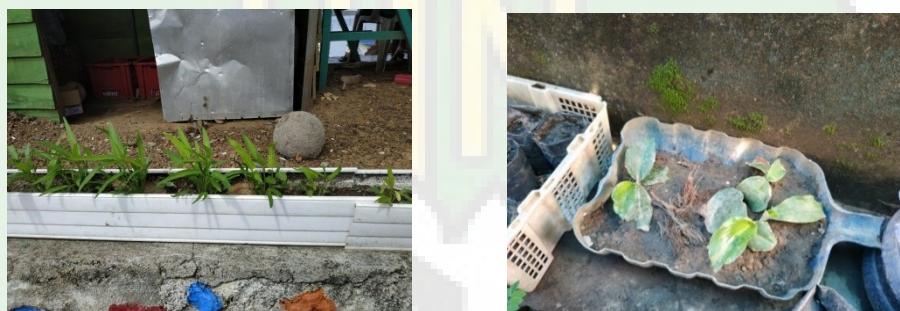
⁶⁹ Ibid., hlm 65

- b. Langkah selanjutnya ialah berupa media semai; yang mana pupuk yang digunakan ialah pupuk kompos dari hasil pengolahan WCP.



Gambar 8. Tempat penyimpanan pupuk kompos⁷⁰

- c. Persemaian dan pemisahan bibit semai menjadi bibit dan dipindahkan ke wadah lainnya yang digunakan adalah tanah milik gampong.



Gambar 9. tempat peletakan bibit semai (*seedling*).⁷¹

Yusrida di berangkat ke Jepang pada tahun 2015 untuk mempelajari sistem pengolahan sampah di Jepang dan pihak DLHK3 mengusungkan jika Gampong Alue Deah Teungoh cocok untuk dijadikan pilot project dan bekerjasama pihak dari negara Jepang dari *Comu Project*. Program yang diberikan terdapat 3 program salah satunya yaitu *field gardening*. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Hayatun Nufus sebagai berikut:

“Program yang dijalankan duluan yaitu *field gardening* sekitar awal bulan agustus 2015, mulai fokus mengembangkan *field gardening* pada tahun 2016. Jadi ada 3 grup dalam satu grup ada 17 anggota.”⁷²

⁷⁰ Hasil Dokumentasi tempat peyimpanan kompos *field gardening* di Gampong Alue Deah Teungoh, pada Tanggal 21 Agustus 2020

⁷¹ Hasil Dokumentasi di WCP 2 Gampong Alue Deah Teungoh, pada Tanggal 20 Agustus 2020

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pada saat *field gardening* dijalankan, masyarakat memiliki kendala yaitu minimnya ketersediaan air pada saat itu sehingga menyiram sayuran menjadi sulit. Dan juga mayoritas perempuan di gampong Alue Deah Teungoh lebih suka mencari tiram karena melihat lokasi perumahan penduduknya berada dekat dekat dengan laut. Perempuan Gampong Alue Deah Teungoh mencari tiram ketika ada orang yang ingin memesan tiram. Dengan cara menjualnya agar mendapatkan penghasilan lebih, Karena perempuan mereka juga sudah terbiasa mencari tiram. Sementara tujuan *field gardening* adalah untuk menambah ekonomi keluarga karena masyarakat disana tidak harus pergi ke pasar untuk membeli sayur dan membeli sayur dengan harga miring.

Melihat kondisi tersebut, pada saat itu perempuan Gampong Alue Deah Teungoh lebih memilih mencari tiram. Sebagian lagi peserta yang mengikuti Field Gardening. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Hayatun Nufus sebagai berikut:

“Bermula dari 40 orang tinggal saya sendiri yang mengelola *field gardening* di Gampong Alue Deah Teungoh. Ada satu teman saya yang mau mendampingi yang bernama Buk Kasmin terakhir beliau juga menyerah karena tidak ada penghasilan untuk mengelola *field gardening*, kalau saya tidak mengharapkan penghasilan tapi saya mau saja dan sekalian ingin belajar karena memang saya tidak ada ilmu dasar dalam hal menanam. Awalnya saya tidak mengenal bibit sekalipun. Dan ketika orang Jepang mengadakan pelatihan di gampong ini saya baru mengerti jenis-jenis bibit sayuran. Memang tidak diberikan apa-apa, misal apa yang kita perlu seperti tanah timbun atau kawat di bantu oleh *Comu Project* sebagai donatur”⁷³

Hal ini diperkuat oleh hasil temuan penulis yang diungkapkan oleh Ibu Rawani Harahap sebagai berikut:

“*Comu Project* datang ke gampong ini mereka mensosialisasikan tentang sampah dan *field gardening*. Pada saat itu saya senang

⁷² Hasil Wawancara dengan Hayatun Nufus, Cleaning Leader Gampong Alue Deah Tengoh, pada Tanggal 21 Agustus 2020

⁷³ Ibid., hlm.67

sekali mengikuti kegiatan tersebut, lalu lama-kelamaan anggotanya sudah pada mundur semua. Lalu mereka menanyakan perihal keberlanjutan program ini, dan jika gampong ini tidak sanggup untuk melanjutkan program maka akan diganti dengan gampong lain. Lalu saya anggota yang masih tersisa untuk membujuk ibu-ibu disana jika memang tidak bisa semua paling tidak sebagian warga masih mengikutinya. Dan sampai sekarang menjadi *pilot project* bagi gampong-gampong di kota Banda Aceh.⁷⁴

Sebelum adanya WCP sisa makanan seperti nasi, buah busuk, sisa-sisa potongan sayur dari ibu rumah tangga sebenarnya semua ini kita buang. Dengan adanya pemilahan sampah ini sisa-sisa makan tersebut dibuat pupuk kompos di *field gardening*. Hasil dari pengoposan tersebut dipakai sebagai pupuk untuk menanam sayur di *field gardening*. Adanya keterkaitan antara keduanya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Hayatun Nufus sebagai berikut:

“Awalnya memang sulit, dengan beriringan dengan pemilahan sampah tersebut tujuannya untuk menanam sayur organik (tidak memakai pestisida/npk) memastikan agar benar-benar organik.”⁷⁵

Karena keberhasilan *field gardening*, Ibu Hayatun Nufus diberangkat ke Jepang pada tahun 2016 untuk mempelajari sistem pengolahan sampah dan *field gardening*, karena semangat dan rasa penasaran beliau ingin mempelajari sesuatu. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Hayatun Nufus sebagai berikut:

“Jika dari pemilahan sampah sudah *field garden* berdiri. Dengan adanya pemilahan sampah sisa-sisa makanan dibuat pupuk, jadi tidak mengeluarkan biaya lagi untuk membeli pupuk. Setelah saya pulang dari jepang mulailah pemilahan sampah.”⁷⁶

Dari analisis yang penulis dapatkan di atas adalah dari *field gardening* inilah muncul pengelolaan sampah melalui Program WCP. Saat ini Program *field gardening* dan Program pengolahan sampah berbasis

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Rawani Harahap, Ketua WCP 6 Keuchik Gampong Alue Deah Teungoh, pada Tanggal 20 Agustus 2020

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Hayatun Nufus, Cleaning Leader Gampong Alue Deah Tengoh, pada Tanggal 21 Agustus 2020

⁷⁶ Ibid., hlm 68

WCP berjalan beriringan dan saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya.

3. Kaderisasi *Cleaning Leader*

Kaderisasi *cleaning leader* lebih kepada pemberdayaan dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan dan mentoring terkait program WCP dan program lanjutan dari WCP yaitu daur ulang yang penulis sebutkan sebelumnya. Hal ini banyak dilakukan oleh *cleaning leader* yaitu Ibu Hayatun Nufus dan kebanyakan dilakukan bukan dalam kegiatan resmi melainkan saat *cleaning leader* melihat oknum masyarakat yang tidak hanya terbatas pada perempuan saja melakukan pembuangan sampah tanpa memilah dan atau tidak membuang pada tempat yang disediakan.

Adapun kaderisasi lainnya yang dilakukan seperti mengajarkan tugas – tugas dari pengelola kepada sasaran penyuluhan dalam hal ini adalah perempuan baik yang berasal dari Gampong Alue Deah Teungoh maupun yang berasal dari Gampong lain. Penulis belum menemukan bukti otentik seperti bukti laporan kegiatan dari aktifitas ini selain dari penjelasan dan keterangan wawancara yang penulis kumpulkan dari beberapa Ketua WCP dan *cleaning leader*.

Menurut Perwal No.17 Tahun 2017 kegiatan sosialisasi disebutkan pada pasal 5 yang menyebutkan *Zero Waste Event* adalah pelaksanaan sosialisasi pemilahan sampah pada titik keramaian atau kegiatan keramaian di gampong yang melaksanakan pengelolaan sampah sistem WCP. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan dengan kelompok WCP, penyampaian pesan-pesan program WCP melalui pamflet, brosur dan bulletin, pelaksanaan *Zero waste event* dan pelaksanaan event tahunan WCP.

Bentuk pendampingan dari DLHK3 masih sampai sekarang selama 3 bulan sekali ada pembinaan ketua WCP dan *cleaning leader* di kantor DLHK3. Ibu-ibu yang memiliki jabatan sebagai ketua WCP di undang ke dinas, tidak hanya gampong Alue Deah Teungoh melainkan gampong yang sudah menjalankan program WCP. Bagi Gampong-Gampong yang

belum paham dengan program WCP selama 3 bulan sekali mereka bertemu dan sharing tentang bagaimana kendala dan kedepannya dalam menjalankan program WCP ini.

Pemantauan atau pengawasan dari Pak Keuchik, ketika kami sudah menjalankan program WCP yang terdiri dari ketua dan *cleaning leader* yang diberikan uang intensif, dan seminggu sekali dilakukan penimbangan kemudian ada juga petugas sampah yang membawa becak gampong (yang diberikan di 90 gampong/kecamatan) harus mengikuti arahan dari pak Keuchik misalnya jika terdapat sampah-sampah di selokan, kemudian diambil dan dimasukkan ke dalam bak becak tersebut lalu dibawa ke kontainer yang ada di lambung, dan selalu ada pemantauan secara berkala.

Karena mereka sudah mendapatkan dana insentif dari gampong, dikumpulkan ketua di setiap WCP di Gampong Alue Deah Teungoh, lalu Pak Keuchik menanyakan kendala serta anggota nya, karena ada kaitannya dengan Gampong Alue Deah Teungoh. Gampong sudah mengeluarkan dana insentif untuk ibu-ibu di Gampong Alue Deah Teungoh. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Rawani Harahap sebagai berikut:

“Sejak saya jadi ketua WCP 6 ini, terhitung sudah 7 tahun program WCP berjalan di Gampong kami, dan baru 3 tahun juga kami mendapatkan uang insentif (sebagai relawan). Cara kami mensosialisasikan kepada masyarakat baru yaitu dengan door to door yaitu dengan mendatangi rumah tersebut dan menjelaskan bahaya membuang sampah dan membakar sampah seperti apa, sebagian ada yang menanggapi dan sebaian lagi hanya cuek-cuek begitu. Sudah menjadi resiko kita dan kami tidak bosan-bosan untuk mengingatkan.”⁷⁷

Dengan adanya sosialisasi tersebut, masyarakat juga dapat saling mengingatkan ketika mereka lupa, dan adanya evaluasi dan mentoring baik dari pihak gampong maupun dari pihak DLHK3

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Rawani Harahap, Ketua WCP 6 Keuchik Gampong Alue Deah Teungoh, pada Tanggal 20 Agustus 2020

menjadi agenda yang sangat penting untuk dilakukan secara berkelanjutan.

D. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Perempuan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan Program WCP di Gampong Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraksa, Kota Banda Aceh menjadi wadah bagi perempuan disana untuk dapat mengembangkan keterampilan dalam mengolah sampah plastik menjadi kerajinan tangan serta membuat pupuk kompos dari sampah rumah tangga, serta pengelolaan *field gardening* di Gampong Alue Deah Teungoh yang dapat menjadikan sebuah produk yang bernilai jual yang akan membuat usaha kelompok perempuan di Gampong tersebut menjadi berkembang. Adanya program ini memberikan manfaat ekonomi bagi perempuan sehingga dapat terbantu kebutuhan keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga seperti kebutuhan sandang pangan dan papan yang menjadikan perempuan disana lebih mandiri.

1. Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan

Pengetahuan perempuan mengenai jenis sampah dan cara pengelolaannya, khususnya sampah plastik merupakan hal penting dalam pengembangan WCP dan pengembangan produksi produk daur ulang menjadi aneka kreasi kerajinan tangan dan pupuk kompos. Edukasi pada warga dapat mengubah kebiasaan warga dalam mengelola sampah. Kehadiran WCP menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi masalah sampah di perkotaan yang saat ini masih mengalami kompleksitas masalah dalam penerapannya, dikarenakan belum terintegrasi dan masih bersifat lokal. Pengembangan WCP akan lebih terintegrasi dengan adanya dukungan dari pemerintah kota setempat menjadi sangat penting. Pada dasarnya intervensi pihak pemerintah kota setempat diperlukan dalam mendukung kelancaran kegiatan serta peran pihak pengusaha lokal diperlukan untuk meningkatkan nilai ekonomis dari pengolahan sampah di

masyarakat. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Hayatun Nufus sebagai berikut:

“Untuk memberdayakan Gampong ini, program WCP memberikan kesempatan kepada ibu-ibu rumah tangga yang memiliki keahlian menjahit, dimana sampah plastik yang masih layak pakai dijadikan kerajinan-kerajinan tangan. Disamping menjadi Ibu rumah tangga, mereka juga menjahit kerajinan tangan ketika ada orderan, kami mendorong ibu rumah tangga untuk memiliki penghasilan sendiri dengan keahlian yang mereka dimiliki, dan menjadi kegiatan ketika mereka suntuk”⁷⁸

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa program WCP di Gampong Alue Deah Teungoh menjadi peluang terbukanya peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat disana, tetapi juga dapat mengubah pola hidup yang sehat dengan peduli terhadap lingkungan.

2. Memperluas Jaringan WCP

WCP Gampong Alue Deah Tengoh memperluas jaringan atau bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait untuk memaksimalkan kegiatan WCP dibawah koordinasi DLHK3 Kota Banda Aceh melalui gampong-gampong terdekat di sekitar Gampong Alue Deah Teungoh. Melakukan kerja sama dan jalinan hubungan (*networking*) dengan usaha/kegiatan sejenis maupun lintas sektor, baik dengan instansi pemerintah, kedinasan, dan pihak swasta yang dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan WCP di Gampong Alue Deah Teungoh. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Hayatun Nufus sebagai berikut:

“Di luar gampong saja juga turut mensosialisasikan pemilahan sampah, seperti saat saya diundang di acara pesta pernikahan, pada saat itu saya melihat ada ibu-ibu yang membuang kemasan botol minuman gelas, lalu saya bilang “buk jangan dibuang sembarangan, jika dikumpulkan bisa jadi uang” tergantung keadaan atau cara kita

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Hayatun Nufus, Cleaning Leader Gampong Alue Deah Tengoh, pada Tanggal 21 Agustus 2020

menyampaikan, jangan sampai nanti ada yang tersinggung juga, saya sesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat itu.”⁷⁹

Hal ini juga dipertegas oleh hasil temuan penulis pada saat melakukan observasi dan wawancara sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Rafnila sebagai berikut:

“Cara kami mensosialisasikan kepada masyarakat baru yaitu dengan door to door yaitu dengan mendatangi rumah tersebut dan menjelaskan bahaya membuang sampah dan membakar sampah seperti apa, sebagian ada yang menanggapi dan sebagian lagi hanya cuek-cuek begitu. Sudah menjadi resiko kita dan kami tidak bosan-bosan untuk mengingatkan”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas Gampong Alue Deah Teungoh sering membuat kegiatan terkait dengan WCP diantaranya diikuti oleh gampong yang ada di Banda Aceh sebagai bentuk sosialisasi terhadap WCP dengan memberikan ilmu pengetahuan kepada gampong-gampong di wilayah Banda Aceh yaitu Gampong Lambaro Skep, Gampong Deah Glumpang, Gampong Cot Lam Kuweuh, Namun peserta yang mengikuti tidak sebanyak Gampong Alue Deah Teungoh yang dilaksanakan di Kantor Geuchik Gampong Alue Deah Teungoh.

3. Meningkatkan Penghasilan

Melalui program WCP dalam meningkatkan pendapatan perempuan di Gampong Alue Deah Teungoh dan perempuan memiliki peran untuk bisa bagaimana memilih dan memilah sampah-sampah yang dihasilkan, setelah memilih dan memilah kemudian menggalakan sosialisasi tentang pengolahan sampah dengan berbagai metode baru yaitu melalui program WCP maupun pengolahan pupuk kompos. Sehingga sampah yang dihasilkan dapat peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan pendapatan bagi perempuan di Gampong Alue Deah Teungoh serta mampu meminimalisir perkembangan dan

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Hayatun Nufus, Cleaning Leader Gampong Alue Deah Teungoh, pada Tanggal 21 Agustus 2020

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Rafnila, Ketua WCP 10 Gampong Alue Deah Teungoh, pada Tanggal 21 Agustus 2020

penumpukan sampah yang terjadi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Siti Rukyah sebagai berikut:

“Sebelum tau program WCP saya tidak mempunyai pendapatan apa- apa, semua tergantung suami. Tapi setelah saya mengikuti program WCP. Saya baru belajar bercocok tanam dan membuat pupuk kompos. Dulu di depan rumah saya hanya lahan kosong yang tidak terpakai, sekarang saya memanfaatkan itu menjadi kebun, sekarang pendapatan saya meningkat dengan menanam dan menjual sayur organik. Pembelinya tak hanya warga Gampong Alue Deah Teungoh saja tetapi juga warga diluar gampong.”⁸¹

Berdasarkan pemaparan temuan data di atas juga mengantarkan kita bahwa pihak perempuan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi tersebut menempatkan pihak perempuan sebagai pelaku utama dari kegiatan baik itu kegiatan awal yaitu WCP maupun kegiatan lanjutan berupa pengolahan sampah menjadi produk layak guna dan kegiatan pembuatan pupuk kompos dan *field gardening*. Sebagaimana bentuk keberhasilan perempuan Gampong Alue Deah Teungoh dalam meningkatkan ekonomi. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara bersama Ibu Hayatun Nufus sebagai berikut:

“Kami pernah mendapatkan penghasilan ketika ada acara tahunan yaitu acara bebas sampah nasional kami menerima pesanan kotak pensil dalam jumlah besar, pada kotak pensil tersebut ada lambang bebas sampah dan Gampong Alue Deah Teungoh, meraup keuntungan sebanyak Rp.12.500.000 dari hasil saset sampah plastik tadi, tidak hanya itu kami juga menerima pesanan tas dari acara IMT (Indonesia-Malaysia Thailand) dan membuat map dari sampah plastik, kebanyakan orang malaysia yang memesan. Berhubung kami juga menjadi narasumber-narasumber di Gampong lain, jika ada orderan yang melebihi kapasitas maka kami memberikan juga kepada Gampong lain biar gampong lain juga merasakan hasilnya. Setahun sekali diadakan EXPO lingkungan yang diadakan di Taman Sari DLHK3 yang mengadakan acara tersebut, semua gampong dibawah binaan DLHK3 tampil dalam acara tersebut. Dengan berbagai macam

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Siti Rukyah, Ketua WCP 2 Gampong Alue Deah Teungoh, pada Tanggal 22 Agustus 2020

jenis daur ulang mereka memamerkan hasil karya mereka dan juga diperlombakan.⁸²

Dapat dipahami bahwa dengan diadakannya program WCP maka pihak yang terkait yang kebanyakan berasal dari kaum perempuan sebagai pelaku merasakan sendiri peningkatan ekonomi yang bersumber kegiatan lanjutan dari WCP tersebut. Selain dari kegiatan lanjutan pihak pengelola WCP juga menjual beberapa barang atau bahan yang telah diolah atau dipilah kepada pihak DLHK3 Banda Aceh setiap 3 bulan sekali dengan detil data sebagai berikut:



⁸² Hasil Wawancara dengan Hayatun Nufus, Cleaning Leader Gampong Alue Deah Teungoh, pada Tanggal 21 Agustus 2020

PEMBAYARAN DAUR ULANG BULAN JANUARI- MARET 2019 GP. ALUE DEAH TEUNGOH																
	Depo 1	Jumlah	Depo 2	Jumlah	Depo 3	Jumlah	depo 4	Jumlah	Depo 5	Jumlah	Depo 6	Jumlah	Depo 7	Jumlah	Depo 9	Jumlah
PET	2.8	4,200	7.5	11,250	20	30,000			3	4,500	7	10,500	3.2	4,800	3.5	5,250
KARDUS	11.5	9,200	17.4	13,920	102.2	81,760	10.7	8,560	0.5	400	36.2	28,960	27.7	22,160		
ALUMINIUM	0.3	1,800	0.5	3,000	0.8	4,800			0.1	600			0.6	3,600		
DUPLEK					11.6						0.7					
ATOM	11.5	17,250	17.8	26,700	8.7	13,050	3	4,500			4.5	6,750	4.5	6,750	7	10,500
KACA			30	1,500	49	2,450	3	150	21		3	150	18	900	4	200
KALENG	2	400	10.6	2,120							2	400			4	800
BESI											10	20,000			2	4,000
PP	6.9	13,800	17.7	35,400	69.3	138,600	9.5		8		13.1	26,200	14.5	29,000	14	28,000
HVS	4	4,800									4	4,800	13	15,600		

Total 51,450 93,890 270,660 13,210 5,500 97,760 82,810 48,750

Jumlah keseluruhan : 664,030

PEMBAYARAN DAUR ULANG BULAN JULI- SEPTEMBER 2019 GP. ALUE DEAH TEUNGOH																
	depo 1	jumlah	depo 2	jumlah	depo 3	jumlah	depo 4	jumlah	depo 5	jumlah	depo 6	jumlah	depo 7	jumlah	depo 9	jumlah
PET K	12.8	16,640			52.8	68,640	12.5	16,250	13	16,900	20.4	26,520	19	24,700	5.6	7,280
pet B					12	36,000							10	30,000		
KARDUS	19.9	11,940			114.9	68,940	32.5	19,500	35	21,000	56	33,600	33.2	19,920		
ALUMINIUM					0.6	3,600							0.6	3,600	0.4	2,400
DUPLEK					7.4	1,480	3	600	2	400	1	200	9.1	1,820		
ATOM	7	14,000	2	4,000	16.5	33,000	1.7	3,400	2	4,000	8.5	17,000	8.5	17,000	6.5	13,000
KACA	95	4,750			167	8,350	10	500	51	2,550	19	950	92	4,600	12	600
KALENG					7	1,400					2	400			3.4	680
BESI	1.3	2,600									2.7	5,400	4	8,000		
PP/ A3	7.7	15,400			90.8	181,600	10.7	21,400	1	2,000	1	2,000	5.8	11,600	6.9	13,800
HVS (B)																
hvs (K)	3	2,400			2	1,600										
monti															1.9	2,850
SASET	9	-			1	-	2.7	-			3.3	-	1	-		
KARUNG BERAS					17											
Cangkang Telur	2.8	560			10.8	2,160	2.8	560	1	200			7.6	1,520		
PET W																
Total	158.5	68,290	2	4,000	499.8	406,770	75.9	62,210	105	47,050	113.9	86,070	190.8	122,760	36.7	40,610

Tabel 2. Pembayaran Daur Ulang Tahun 2019 Gampong Alue Deah Tengoh

Sumber: Dokumen DLHK3 Kota Banda Aceh



Berdasarkan data dalam tabel yang penulis dapatkan dari pihak DLHK3 maka penulis menyimpulkan bahwa ternyata tidak semua barang atau sampah yang telah dipilah langsung diolah oleh pihak perempuan di gampong tersebut melainkan juga dijual kembali kepada pihak DLHK3 Banda Aceh.

Berdasarkan pemaparan temuan data di atas juga mengantarkan kita bahwa pihak perempuan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi tersebut menempatkan pihak perempuan sebagai pelaku utama dari kegiatan baik itu kegiatan awal yaitu WCP maupun kegiatan lanjutan berupa pengolahan sampah menjadi produk layak guna dan kegiatan pembuatan pupuk kompos dan *field gardening*.

Pelaku utama yang penulis maksud adalah menjadikan perempuan yang mengolah kegiatan tersebut seperti yang memisahkan dan mengelompokkan sampah yang terkumpul yang selanjutnya mengolahnya menjadi bahan modal awal untuk dua kegiatan lanjutan yang dilakukan di Spot WCP dilakukan oleh perempuan. Selain sebagai pelaku, perempuan juga dilibatkan menjadi murid atau orang yang diberikan penyuluhan dan pelatihan terkait kegiatan lanjutan dan penjualan produk hasil panen dari *field gardening*, pembuatan kerajinan dan produk – produk layak guna lainnya. Perempuan yang dilibatkan menjadi murid atau target penyuluhan atau orang yang diberikan penyuluhan dan pelatihan tidak hanya yang berasal atau bertempat tinggal dari Gampong Alue Deah Teungoh saja namun juga termasuk perempuan – perempuan yang berasal dari gampong lain disekitar Gampong Alue Deah Teungoh.



Gambar 10. Dokumentasi Kunjungan Ibu-Ibu dari Gampong Alue Deah Glumpang ke Taman Gampong Alue Deah Tengah.

Tidak hanya itu, kegiatan yang pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak perempuan ini juga disambut dan diapresiasi oleh Walikota Banda Aceh dan pihak Walikota sangat mendukung program dan kegiatan – kegiatan lanjutan ini.



Gambar 11. Dokumentasi Kunjungan Bapak Walikota H. Aminullah Usman Berkunjung ke Taman Gampong Alue Deah Tengah sebagai bentuk dukungan dan penyerahan hibah alat – alat *field gardening*.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya bahwa WCP merupakan program yang mana negara Jepang menjadi pencetus dan penggerak dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu pihak Jepang juga melakukan pemantauan sekaligus kunjungan lebih tepatnya Walikota Higashi Matsushima yaitu Iwao Atsumi yang sekaligus menjadi pertanda dukungan pihak Jepang pada program WCP dan kegiatan lanjutan yang dilakukan oleh pihak perempuan tersebut.



Gambar 12. Dokumentasi Kunjungan Bapak Walikota Higashi Matsushima Iwao Atsumi ke Taman Gampong.

Analisis penulis terkait temuan lapangan dapat dikategorikan menjadi dua pembahasan. Pertama analisis terkait pelaksanaan program Waste Collecting Point di gampong tersebut sebagai perpanjangan tangan dari program DLHK3. Kedua analisis terkait pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program Waste Collecting Point.

Pada bahasan pertama terdapat banyak hal yang tidak sesuai dengan atau ketidaksesuaian antara aturan pelaksana dengan yang terjadi di lapangan, atau bisa dipahami dengan bahasa lain bahwa DLHK3 kurang mengontrol pelaksanaan WCP di gampong tersebut. Hal ini terbukti dengan

ketidakseimbangan dari keberlangsungan beberapa Spot dari WCP yang di kontrol dan di awasi sehingga hanya beberapa Spot WCP yang sampai sekarang memiliki kegiatan rutin. Ada beberapa spot dari WCP yang tidak seaktif WCP lainnya. Hal ini tentu berakibat ketidak seimbangan pemberdayaan antara spot – spot lainnya. Sehingga tentunya berakibat kepada ketidak seimbangan pedapatan atau keuntungan yang diraub dari kegiatan atau program WCP tersebut dengan efek jangka panjang berupa kesenjangan ekonomi yang awalnya ingin diberdayakan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang dilakukan penulis sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan yaitu

1. Bentuk pemberdayaan ekonomi perempuan di Gampong Alue Deah Teungoh yang dilakukan terdiri dari tiga bentuk yaitu daur ulang sampah menjadi layak guna atau bernilai jual, pembuatan pupuk kompos dan *field gardening*, dan kaderisasi *cleaning leader*. Daur ulang yang dikuasai melalui tahap edukasi, bagaimana perempuan di Gampong Alue Deah Teungoh belajar menguasai daur ulang sampah, dan memiliki kemampuan melakukan daur ulang dengan cara peningkatan kapasitas (*capacity building*) dengan melakukan training atau pelatihan terkait dengan daur ulang sampah secara mandiri.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis paparkan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan peningkatan kesejahteraan perempuan melalui program *Waste Collecting Point* di Gampong Alue Deah Teungoh ialah sebagai berikut:
 - a. Menambah Pengetahuan dan Keterampilan; pengetahuan yang dimaksud adalah berupa pemilahan dan jenis – jenis sampah serta pengolahan yang dapat dilakukan terkait sampah tersebut. Sedangkan bentuk keterampilan yang dimaksud adalah berupa keterampilan verbal dan praktikal, yang mana verbal terdiri dari kemampuan dalam menyampaikan sosialisasi, *soft skill* dan *public speaking*. Sedangkan kemampuan praktikal lebih kepada membuat kerajinan yang terbuah dari bahan dasar hasil dari pengolahan tahap awal dari WCP yaitu kerajinan barang yang menjadikan barang tersebut menjadi layak guna dan bernilai jual.

- b. Memperluas Jaringan; Memperluas jaringan yang dimaksud adalah berupa sosialisasi dalam bentuk penyuluhan terkait program WCP, pentingnya menjaga kebersihan desa dan prospek ekonomi yang menjajikan melalui WCP. Selain itu juga berbentuk peningkatan minat bagi kaum perempuan yang tidak hanya terbatas pada gampong Alue Deah Teungoh namun juga gampong – gampong sekitarnya.
- c. Peningkatan Penghasilan; peningkatan penghasilan yang dimaksud sama seperti konteks yang dibicarakan, yaitu peningkatan taraf ekonomi yang didapat melalui penjualan hasil daur ulang yang sudah dihasilkan, penjualan hasil panen dari *field gardening* dan penjualan barang yang telah dipilah oleh pihak pengelola ke pihak DLHK3 Banda Aceh yang di jual setiap 3 bulan satu kali.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan oleh penulis dalam skripsi ini adalah Pertama, kepada pihak akademisi atau civitas akademika agar dapat membuat dan melanjutkan penelitian lebih lanjut terkait efektifitas WCP dalam rangka mengurangi dampak sampah di kota Banda Aceh maupun di Gampong Alue Deah Teungoh.

Kedua, kepada pihak DLHK3 terkait kegiatan WCP di gampong Alue Deah Teungoh membangun mekanisme monitoring evaluasi bersama antara masyarakat, pengurus WCP dan Pemerintah Kota Banda Aceh. Sehingga WCP menjadi lebih efektif lagi kedepannya.

Ketiga, kepada pihak Gampong Alue Deah Teungoh beserta perangkatnya diharapkan kedepan adanya Qanun Gampong yang mengatur tentang pelaksanaan WCP di Gampong Alue Deah Teungoh.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat, Jakarta: BPS, 2006.

BPS Kabupaten Pasangkayu, Indikator Kesejahteraan Kabupaten Pasangkayu, Mamuju: Cv. Mitra Karya, 2018.

Badriayyah Djula, Sumber Daya Alam dan Pertumbuhan Ekonomi, *dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo*, 2013.

Chambers, *Rural development : putting the last first*. London ; New York: Longman, 1985

Ife, J.W., *Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice*. Melbourne : Longman, 1995.

Nanih Machendrawatih, Agus Ahmad Syafii. *Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.

Raharjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Jakarta: Gramedia, 1999.

Suparmoko Irawan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: Rajawali, 1992.

2. Jurnal

Andi Nur Graha, Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi, *Jurnal Ekonomi MODERNISASI*, Vol. 5, No. 2, Juni 2009.

Astriana Widyastuti, Analisis Hubungan Antara Produktifitas pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009, *Economics Development Analysis Journal (EDAJ)*, Vol. 1, Tahun 2012. Diakses melalui:

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/472/>

- Bambang Susilo, Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Tani Berbasis Kelembagaan, *Muwazah*, Vol. 2, No. 2, Desember 2010.
- Djaja Hendra, Analisis Pemikiran Henri Levevre Tentang Ruang Dalam Arsitektur Modern: Suatu Perspektif Sosiologis, *dalam Jurnal Universitas Negeri Jakarta*. Diakses dari <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jmb/article/download/9092/6203>
- Eifel Rio, dkk., Perencanaan Aplikasi Informasi Tempat Pembuangan Sampah Terdekat di Kota Jambi Berbasis Android, *Jurnal Ilmiah Media Processor*, Vol. 10, No. 2, Oktober 2015.
- Erni Febrina Harahap, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh Dan Mandiri, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 3, Nomor. 2.
- Kabeer, *Reflections on The Measurement of Women's Empowerment in Discussing Women Empowerment: Theory and Practices*. *Journal of Sida Studies* No.3. 2001.
- Lonni, Tahir Kasnawi, Paulus Uppun, *Influence Quality Human Resource to Growth of Economics in Sub-Province of Mamasa (Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mamasa)*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan: (Kajian Ekonomi Negara Berkembang)*, JEP. Vol. 7, No. 2, 2002, <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/4013e72702847521673251f61042c080.pdf>
- Retno Endah Supeni. Maheni Ika Sari, Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pengembangan Manajemen Usaha Kecil (Studi Diskriptif Pada Kegiatan Usaha Kecil Ibu-Ibu Desa Wirolegi Kabupaten Jember, Dampingan Pusat Studi Wanita Um Jember), *Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan*, Fakultas Ekonomi, UNIMUS, 2011.
- Rizqi Puteri Mahyudin, Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan, *dalam Jurnal EnviroScientiae Universitas Lambung Mangkurat*, 2014. Diakses dari <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/es/article/view/1962/1709>

3. Skripsi

Itawarni, *Strategi Komunikasi Edukasi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh (Studi Penerapan Program Waste Collecting Point di Gampong Alue Deah Teungoh Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh)*, Skripsi Mahasiswi Fak. Dakwah dan Komunikasi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. 2019.

Sri Winarni. *Pola Pemberdayaan Pertanian oleh LSM Prakarya di Desa Sumur Genuk Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Surabaya*, Skripsi Mahasiswi Fakultas Dakwah Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, IAIN Sunan Ampel. 2010.

Wirda Yanti, *Keberadaan Tempat Pembuangan Akhir Terhadap Pengembangan Ekonomi Komunitas Pemulung (Studi Di Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja Kota Banda Aceh)*, Skripsi Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Prodi Kesejahteraan Sosial. 2017.

4. Artikel

Agus Purbathin Hadi. *Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan. Artikel Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA). 2010.*

Irwan Ridwan Rahim, Mery Selintung, dkk. *Studi Karakteristik Sampah Kantor Walikota Makassar Dan Alternatif Pengolahannya, Artikel Universitas Hasanuddin Jurusan Teknik Sipil, t.t*

Linda Mayoux, *Gender Equity, Equality, and Women's Empowerment. Principle, Development and Framework*, Aga Khan Foundation, 2001. Diakses dari situs <http://www.genfinances.net>.

Retno Endah Supeni, Maheni Ika Sari, *Konse, Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pengembangan Manajemen Usaha Kecil (Studi Diskriptif Pada Kegiatan Usaha Kecil Ibu-Ibu Desa Wirolegi Kabupaten Jember, Dampingan Pusat Studi Wanita UM Jember)*, Artikel Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi UNIMUS.2011.

Yuli, Artikel *10 Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Ekonomi*. 2019.
<https://www.dosenekonomi.com/>

5. Perundang-undangan

Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dengan Sistem *Waste Collecting Point*.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

6. Internet

<https://www.kumparan.com/amp/acehkini/sampah-banda-aceh-kisah-lepasnya-adipura-1550719255977833555/>

<http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/4013e72702847521673251f61042c080.pdf>.

<http://www.genfinances.net>.

<https://core.ac.uk/download/pdf/77619521.pdf>

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/472/>.

<http://www.academia.edu>.

https://repository.ung.ac.id/get/simlit_res/1/366/

<https://www.dosenekonomi.com/>

<https://www.ajnn.net/news/banda-aceh-produksi-576-ton-sampah-tiap-hari/>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/70307/perwali-kota-banda-aceh-no-7-tahun-2017/>

<http://dlhk3.bandaacehkota.go.id/2017/07/13/wcp-untuk-banda-aceh-bebas-sampah-2025/>

<http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/4013e72702847521673251f61042c080.pdf>

<https://kbbi.kemendikbud.go.id/>

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UINAP-RANIRYBANDAACEH**
Nonor: B-3311/Un.0BFDK/Kp.00.4/11/2020
Tenlang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan siap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri (No. 19 Tahun 2005), tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Peningkatan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Sialuldi IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang delegasi Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.4?3925/2020, Tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi

Pejabat :
1. Dr. T. Lembong Misbah, MA Sebagai Pembimbing UTAMA
2. Dede Suhendra, MH Sebagai Pembimbing KEDUA

Untuk membimbing KUK Skripsi:

Nama : Cut Beutari Ridhaya

NIM/Jurusan : 16@@0131 Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Judul : Pemoerdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program *Waste Recycling Point (WCP)* Di Gampong Alue Deah Tengoh, Kecamatan Meuraksa, Kota Banda Aceh

Kedua Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga Pembiayaan (biaya) keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
Xeempat Segala sesuatu akan diubah dan ditelaah kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Banda Aceh

Pada Tanggal: 12 November 2020.

26 Rabiul Awal 1442 H



Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa/a yang bersangkutan
5. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.3617/Un.08/FDK/PP.00.9/12/2020
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Keuchik Gampong Alue Deah Tengah
2. Kantor DLHK3 Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Cut Beutari Ridhaya / 160404013**
Semester/Jurusan : IX / Pengembangan Masyarakat Islam
Alamat sekarang : Jl. Tanah Tinggi No.7 Kp.Keuramat, Kuta Alam, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program Waste Collecting Point (WCP) di Gampong Alue Deah Tengah, Kecamatan Meuraksa, Kota Banda Aceh**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Desember 2020

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Desember
2020

Drs. Yusri, M.L.I.S.

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan berikut ini diajukan dalam rangka untuk mencari data proposal penelitian yang akan dilakukan dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program *Waste Collecting Point* (WCP) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perempuan (Studi Kasus di Gampong Alue Deah Teungoh, Kecamatan Meuraksa, Kota Banda Aceh)”. Rangkaian Jawaban dari pertanyaan yang akan diajukan ini nantinya akan dijadikan sebagai data untuk menganalisis masalah yang hendak diteliti. Adapun rangkaian pertanyaan yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

A. Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Jabatan/posisi dalam kegiatan:

B. Daftar Pertanyaan

1. Pertanyaan awal seputar identitas dan jabatan/posisi dalam kegiatan WCP.
2. Apa alasan atau pertimbangan lainnya sehingga gampong/desa ikut ikut serta dalam kegiatan WCP?
3. Apa yang ibu/bapak tau mengenai kegiatan WCP tersebut?
4. Sudah berapa lamakah kegiatan WCP tersebut dilakukan oleh pihak gampong?
5. Bagaimanakah sosialisasi dari kegiatan WCP tersebut dilakukan kepada masyarakat gampong?
6. Bagaimanakah antusias/reaksi/sejenisnya terhadap kegiatan WCP?
7. Adakah pendampingan terkait program WCP tersebut? Lantas bagaimanakah bentuk pendampingannya?

8. Adakah pemantauan dan atau pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa dan instansi terkait lainnya mengenai kegiatan WCP di gampong tersebut? Lantas bagaimana bentuknya?
9. Bagaimanakah pengelolaan yang dilakukan terhadap kegiatan WCP tersebut?
10. Apakah dengan adanya kegiatan WCP tersebut masyarakat dapat atau menerima pemberdayaan yang dibutuhkan?
11. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan terhadap perempuan, apakah bentuk pemberdayaan yang diterima dan dijalani oleh kaum perempuan di gampong/desa tersebut melalui kegiatan WCP?
12. Bagaimanakah komunikasi antar peserta kaum perempuan terhadap kegiatan WCP tersebut?
13. Adakah penambahan atau improvisasi yang dilakukan oleh keanggotaan WCP gampong tersebut dalam melakukan kegiatan WCP?
14. Apakah dampak atau hasil yang telah dirasakan/diterima lainnya sejak program kegiatan WCP tersebut berjalan? Khususnya pada terhadap pemberdayaan kaum perempuan di gampong atau desa tersebut?
15. Bagaimanakah efektivitas dari kegiatan WCP tersebut dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat khususnya kaum perempuan dan kebersihan kota?

Lampiran Gambar

1. Lampiran Foto Cleaning Leader dan Ketua WCP



2. Lampiran Foto WCP



4. Lampiran Kegiatan Daur Ulang





5. Lampiran Pemanfaatan Field Gardening













**Kunjungan Bapak Walikota Higashi Matsushima
Ikuo Atsumi Ke Taman Gampong**



**Bapak Walikota H. Aminullah Usman Berkunjung
Ke Taman Gampong Alue Deah Teungoh**



